

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 02 Desember 2022
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember



dr. Lilik Lailiyah, M.Kes
Pembina IV/a
NIP 19651028 199602 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya OPD	39
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	58
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	63
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	66
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	66
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	72
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Kesehatan dan Sasaran Kementrian Kesehatan	78
3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur....	84
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	89
3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat	92
3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis	96
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	101

4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	101
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	105
BAB 5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	111
5.1	Umum	111
5.2	Strategi dan Arah Kebijakan	116
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	120
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	120
BAB 7	INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	219
7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan	219
BAB 8	PENUTUP	230

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan.....	39
Tabel 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	40
Tabel 2.3 Rasio Keberadaan Tenaga Medis di Kabupaten Jember	41
Tabel 2.4 Rasio Keberadaan Tenaga Kesehatan Lainnya di Kabupaten Jember.....	41
Tabel 2.5 Standar Target Ratio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, 2019, sampai 2025 (Kepmenko Bidang Kesra No. 54 Tahun 2013).....	42
Tabel 2.6 Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Per 1 Januari 2021	44
Tabel 2.7 Rincian Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Per 1 Januari 2021	44
Tabel 2.8 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember	48
Tabel 2.9 KIB A (TANAH) Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Jember.....	49
Tabel 2.10 KIB B (KENDARAAN BERMOTOR) Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Jember	54
Tabel 2.11 KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN) Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Jember	56
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Utama Masa Renstra Sebelumnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	58
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.....	60
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Jember	67
Tabel 3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...	72
Tabel 3.3 Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Sasaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	78

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya	83
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya.....	85
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ditinjau dari Implikasi RTRW.....	88
Tabel 3.7 Rumusan Kreteria Penentuan Isu - isu Strategis.....	98
Tabel 3.8 Penetapan Isue - isue Strategis	99
Tabel 4.1 Penjabaran Program Unggulan Bupati Bidang Kesehatan Wes Wayahe SDM Jember Unggul 2021-2026	102
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	108
Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.....	118
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	128
Tabel 6.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rutin Dinas Kesehatan Kab. Jember 2021-2026	166
Tabel 6.3 Penjabaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unggulan Bupati/Wakil Bupati Kab. Jember Wes Wayahe SDM Jember Unggul Bidang Kesehatan.....	171
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD	4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Jember	15
Gambar 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu	106
Gambar 5.1 Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026.....	113
Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Kesehatan.....	115

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Secara lebih jelas bahwa Rencana Strategis itu sendiri merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kab. Jember merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember “Sudah Waktunya Membernahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”, dengan Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan dengan Sistem yang Terintegrasi. Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementerian Kesehatan 2021-2026 serta Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021

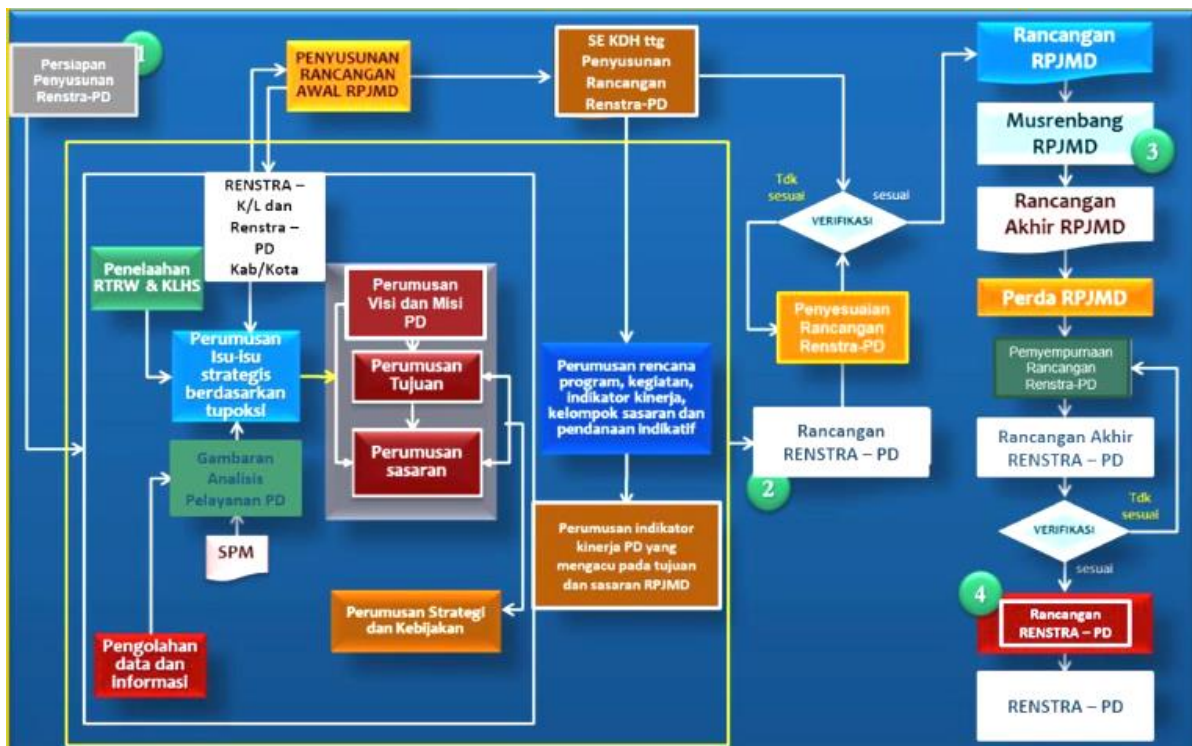
- 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 03 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 03), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi - Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Kesehatan, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka

secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
26. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Bidang Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kesehatan Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan di bidang Kesehatan.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik dalam mencapai prioritas daerah di bidang kesehatan.
6. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.
7. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu-isu strategis
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama

		lima tahun
		4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
		5.1 Umum
		5.2 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
		6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
BAB VII		INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII		PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KAB. JEMBER

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 02 dan pasal 03 disebutkan bahwa “Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dan urusan pemerintahan bidang wajib serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

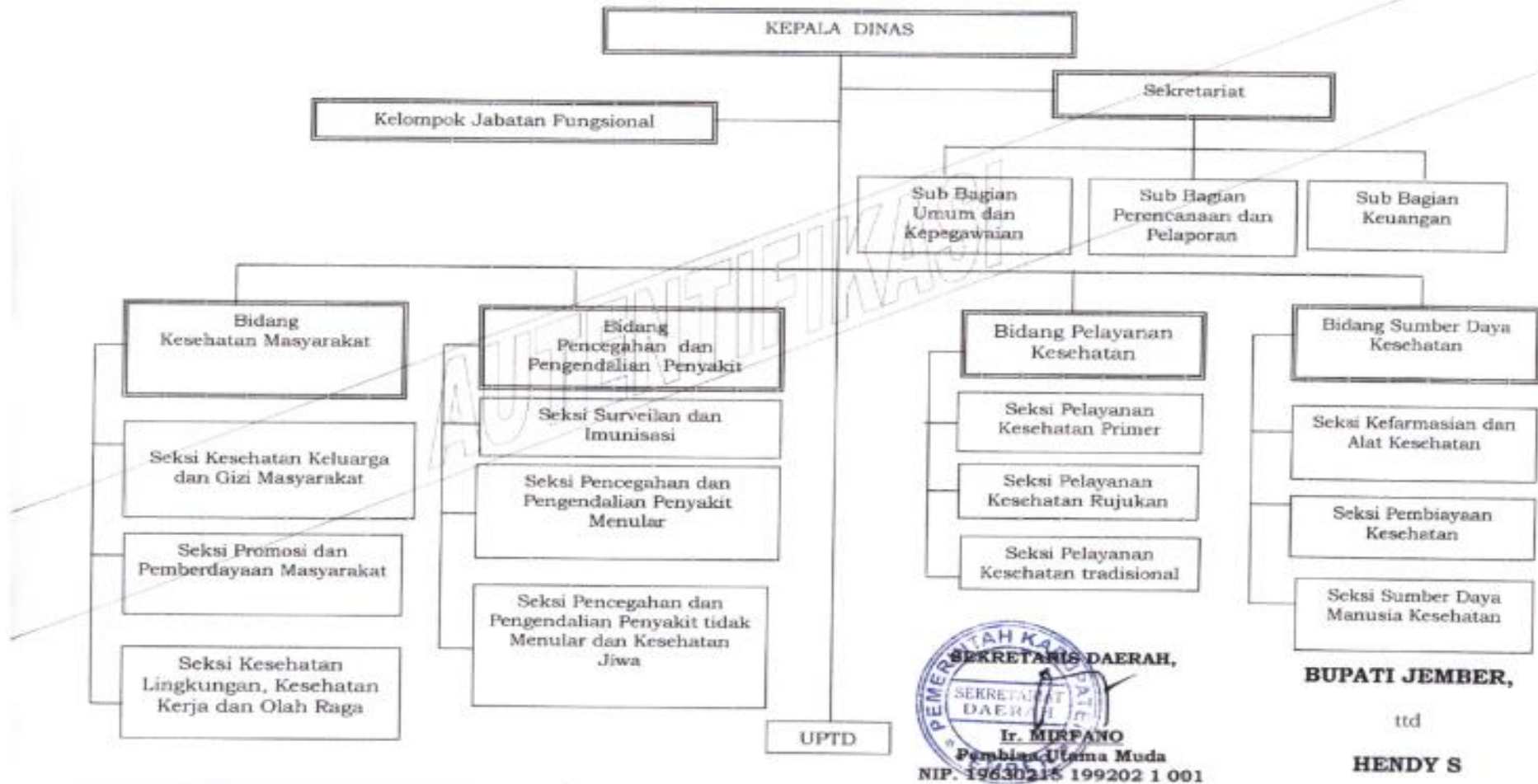
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c) Sub bagian Keuangan;
 2. Bidang Kesehatan masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga;
 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - a) Seksi Surveilan dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- 4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - d) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - e) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - f) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 5. Bidang SUMBER Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - g) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - h) Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - i) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Jember

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 3 TAHUN 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER



Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan,

- Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris.. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c) Pengkoordinasian Pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e) Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan ;
- g) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan dan pembangunan serta pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan pada Dinas;
- h) Pemberian advokasi, koordinasi lintas program dan lintas sector perencanaan program kegiatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
- i) pelaksanaan asistensi penyusunan program dan pengembangan sistem informasi kesehatan pada dinas;
- j) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset dinas, kepegawaian, pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas Sub Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b) Pengadaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c) Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi kepegawaian;

- e) Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f) Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;
- h) Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah; dan
- i) Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- k) Perencanaan dan pemetaan rehabilitasi darana-prasarana dinas beserta jaringannya;
- l) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan tenaga non kesehatan dan mengkoordinasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;
- m) Pelaksanaan koordinasi dan administrasi penempatan tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- n) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengembangan pegawai, disiplin dan budaya kerja pegawai;
- o) Pelaksanaan administrasi penilaian angka kredit fungsional tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- p) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi penanganan hukum tenaga kesehatan;
- q) Penyiapan dan intervensi produk hukum bidang kesehatan;
- r) Pelaksanaan kehumasan dan advokasi; dan

s) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:

- a) penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
- b) pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung yang menjadi tanggung jawab dinas;
- c) pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- d) pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- e) pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- f) pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g) penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- h) penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- i) mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j) pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- k) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas:

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan serta pelaksanaan program dan kebijakan pembinaa, pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi pada ibu, ibu hamil, bayi, balita anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. pelaksanaan pendataan, analisa dan identifikasi kebutuhan dan pembinaan kesehatan balita dan anak, balita stunting;
- d. penjaringan balita stunting dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesehatan balita;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan pelaksanaan program dan kebijakan dan sektor swasta, serta pembinaan teknis operasional koordinasi, sinkronisasi, kemitraan dan penggerakan peran serta masyarakat dengan lintas program, lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi Kesehatan, stakeholder, tokoh masyarakat, dunia usaha dan sektor swasta, dalam rangka pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana, metode serta teknik promosi kesehatan;
- d. pelaksanaan kegiatan posyandu dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas:

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan program dan kebijakan teknis operasional kabupaten sehat, kesehatan lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional kesehatan lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan pangan, kesehatan kerja, dan olah raga;

- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional kesehatan lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan pangan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- d. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan, pembinaan pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan pangan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- e. pemberian sertifikasi laik sehat dalam rangka penyehatan pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Surveilans, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
- e. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi meliputi::

- a. penyiapan perencanaan program , pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional, pembinaan,serta pemantauan dan evaluasi program surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantina kesehatan, krisis masalah kesehatan dan imunisasi;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan program program, kebijakan teknis operasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor, dan zoonotik;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor, dan zoonotik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas..

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan pelaksanaan program, kebijakan teknis operasional pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

5. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan

tradisional dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu pelayanan kesehatan I;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu serta pelayanan kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu serta pelayanan kesehatan;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1) Seksi Kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas :

- a. menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan,

evaluasi, pelaporan dan peningkatan mutu serta perijinan fasilitas kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional, pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin pendirian puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- c. pelaksanaan pemberian ijin operasional puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- d. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Labkesda;
- e. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengajuan usulan pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi sedang dan berat Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Primer dan Jaringannya, termasuk polindes, ponkesdes dan poskestren yang dananya bersumber dari APBD;
- f. Pelaksanaan koodinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sector, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan

- g. Pemberian layanan informasi kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan dan kesehatan ibu hamil; dan
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional, serta peningkatan mutu pelayanan berdasarkan analisis masalah kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis operasional terhadap ketersediaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan

standar mutu layanan ambulan, Jember Safety Center with FAI serta kegawatdaruratan

- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin pendirian Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin operasional dan klasifikasi Rumah Sakit kelas A dan B;
- g. Pembinaan dan Pengawasan Akreditasi Rumah Sakit
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin operasional dan klasifikasi Rumah Sakit kelas C dan D;
- i. Pelaksanaan identifikasi dan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi sedang dan berat Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dananya bersumber dari APBD
- j. Pengelolaan dana bantuan untuk pelayanan kesehatan rujukan yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang peruntukannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
- k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis, pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- c. pelaksanaan perijinan di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pelaksanaan pendataan, analisa dan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan tradisional;
- e. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan tradisional
- f. pemantauan dan supervise peredaran obat- obat tradisional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tradisional;
- g. pelaksanaan layanan kesehata tradisional;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan pembiayaan kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia terdiri dari:

1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi;
- b. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional di bidang kefarmasian, alat dan perbekalan kesehatan, dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat dan perbekalan kesehatan, dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan rekomendasi ijin apotek dan toko obat, toko alkes, dan optikal;
- d. pemberian sertifikasi penyuluhan keamanan pangan industri rumah tangga,
- e. pelaksanaan pembinaan dan rekomendasi ijin produksi pangan industri rumah tangga;
- f. pelaksanaan pembinaan dan rekomendasi ijin usaha mikro obat tradisional;
- g. pelaksanaan pembinaan dan rekomendasi ijin toko alat kesehatan dan optikal;
- h. pelaksanaan pemberian/ pencabutan sertifikasi produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas:

Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional di bidang jaminan kesehatan nasional dan daerah serta program bantuan operasional kesehatan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan nasional dan daerah serta program bantuan operasional kesehatan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kegiatan mobilisasi dana pemerintah, masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah dengan melaksanakan penyusunan dokumen district health account (DHA);
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- b. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- c. pengkoordinasian penilaian angka kredit tenaga kesehatan;
- d. pelaksanaan rekomendasi pelayanan pemberian ijin praktik dan / atau surat ijin kerja tenaga kesehatan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan praktik mahasiswa kesehatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan

- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) DINAS KESEHATAN KAB. JEMBER

Pada Dinas Kesehatan terdapat 52 (Lima Puluh Dua) UPTD yaitu UPTD Puskesmas sebanyak 50 Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Instalasi Farmasi Kabupaten Jember. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Kesehatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan di masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020.

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kab. Jember dan UPTD

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Kesehatan per tgl 02 bulan September 2022 sebanyak 1153 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 21

orang staf dan pelaksanaan fungsi 1133 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 1895 orang.

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan										Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-11	D-1	SLTA	SMP	SD	TANPA IJAZAH		
1	IV/c			1								1	0.09 %
2	IV/b			5								5	0.43 %
3	IV/a		2	19								21	1.82 %
4	III/d		3	51	80			44				178	15.44 %
5	III/c		1	32	33			23				89	7.72 %
6	III/b			73	38		1	58				170	14.74 %
7	III/a			41	52			10				103	8.93 %
8	II/d			1	147		1	28				177	15.35 %
9	II/c				305		1	20	5			331	28.71 %
10	II/b				7			31				38	3.30 %
11	II/a				2			18	2	1		23	1.99 %
12	I/d								10			10	0.87 %
13	I/c								2			2	0.17 %
14	I/b									4		4	0.35 %
15	I/a									1		1	0.09 %
Jumlah ASN			6	223	664		3	232	19	6		1153	
% ASN			0.52 %	19.34 %	57.59 %	0.00 %	0.26 %	20.12 %	1.65 %	0.52 %		100%	100%
16	THL/PTT		3	249	725		2	615	134	116	51	1895	
% THL			0.16 %	13.14 %	38.26 %	0.00 %	0.11 %	32.45 %	7.07 %	6.12 %	2.69%	100%	
JMLH ASN+THL			9	472	1389	0	5	847	153	122	51	3048	
% ASN+THL			0.30 %	15.49 %	45.57 %	0.00 %	0.16 %	27.79 %	5.02 %	4.00 %	1.67%	100%	

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa jumlah pegawai di Dinas Kesehatan total sebanyak 3048 pegawai dengan rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 1153 Pegawai dan Tenaga Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap (THL/PTT) sebanyak 1895 pegawai. Tingkat Pendidikan

tertinggi yaitu S-2 sebanyak 6 Orang dan Terendah SD serta tidak mempunyai Ijazah sebanyak 57 Orang.

Tabel 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	0	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	16	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	1133	PNS
f	Staf	1895	THL/PTT
	Jumlah	3048	

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa Proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan yaitu proporsi dengan jabatan Eselon IV.a merupakan jabatan dengan jumlah terbanyak sebanyak 16 pegawai terdiri dari level jabatan Ka subag dan Kasi di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan. Jabatan dengan jumlah terendah yaitu Eselon II.b di Dinas Kesehatan.

Tabel 2.3 Rasio Keberadaan Tenaga Medis di Kabupaten Jember

Rekap Tenaga Medis			
No	Jenis Tenaga	Jumlah	Rasio/Penduduk/Ket
1	Dokter Spesialis	276	12,6/ 100.000 penduduk/Sesuai
2	Dokter Umum	296	13,5 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
3	Dokter Gigi	117	5,3 / 100.000 penduduk//Tidak Sesuai
4	Dokter Gigi Spesialis	24	1,1 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai

Berdasarkan tabel 2.3 Ratio keberadaan tenaga medis di Kabupaten Jember didapatkan bahwa kebutuhan tenaga medis masih belum memenuhi standar rasio yang ditetapkan yang belum memenuhi Dokter umum, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis yang dibutuhkan.

Tabel 2.4 Rasio Keberadaan Tenaga Kesehatan Lainnya di Kabupaten Jember

Rekap Tenaga Kesehatan Lainnya			
No	Jenis Tenaga	Jumlah	Rasio/Penduduk
1	Perawat	2306	105,4 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
2	Bidan	1.081	49,4 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
3	Kesehatan Masyarakat	80	3,7 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
4	Kesehatan Lingkungan	20	0,9 / 100.000 penduduk/Sesuai
5	Gizi	56	2,6 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
6	Ahli Laboratorium Medik	116	5,3 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
7	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	83	3,8 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
8	Keterampilan Fisik	36	1,6 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
9	Keteknisian Medis	134	6,1 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	166	7,5 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai
11	Apoteker	73	3,3 / 100.000 penduduk/Tidak Sesuai

Berdasarkan tabel 2.4 Rasio keberadaan tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Jember didapatkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan lainnya diluar tenaga medis rata-rata masih belum memenuhi kriteria ratio yang dibutuhkan sesuai standar. Berdasarkan tabel diatas dari 11 tenaga kesehatan yang sudah memenuhi target ratio sesuai standar yaitu tenaga sanitarian/kesehatan lingkungan dengan target ratio 20 saat ini sudah mencapai 20 tenaga.

Tabel 2.5 Standar Target Ratio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, 2019, sampai 2025 (Kepmenko Bidang Kesra No. 54 Tahun 2013)

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Target Ratio Per 100.000 Penduduk (Kepmenko Bidang Kesra No. 54 Tahun 2013)		
		2014	2019	2025
1	Dokter Spesialis	10	11	12
2	Dokter Umum	40	45	50
3	Dokter Gigi	12	13	14
4	Perawat	158	180	200
5	Bidan	100	120	130
6	Perawat Gigi	15	18	21
7	Apoteker	9	12	15

8	Ass. Apoteker	18	24	30
9	SKM	13	16	18
10	Sanitarian	15	18	20
11	Nutrisionist/Ahli Gizi	10	14	18
12	Keterapian Fisik	4	5	6
13	Keterapian Medis	14	16	18

Tabel 2.5 diatas merupakan tabel standar ratio tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang didasarkan pada Ratio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, 2019, sampai 2025 (Kepmenkes Bidang Kesra No. 54 Tahun 2013) yang dapat dijadikan oleh Daerah sebagai pedoman dalam Rekrutmen/Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab./Kota Jember

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai di atas didapatkan bahwa dari segi pemenuhan ratio ketenagaan baik medis maupun tenaga kesehatan lainnya masih belum memenuhi sesuai dengan standar kebutuhan yang ada sehingga perlu adanya optimalisasi terkait dengan pemenuhan/recruitment daerah terhadap belum terpenuhinya tenaga-tenaga tersebut diatas. Selain itu diharapkan OPD saat ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Kesehatan belum sepenuhnya memadai karena masih terdapat kebutuhan tenaga yang belum dicukupi secara standar serta saat ini di Dinas Kesehatan didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 33.97%, SLTA sebesar 52.58%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 64.69%, untuk pegawai Non ASN 48.43% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD

sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sarana Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas Kesehatan Kab. Jember							
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)	
1	KIB A	Tanah	178	meter	M2	46.095.075.140,00	
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	27.688	Buah		241.153.656.062,32	
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	355	Unit		342.876.665.235,55	
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	14	Unit		2.532.421.100,00	
5		Aset Tetap Lainnya	125	Buah		55.878.400,00	
6		Kontruksi Dalam Pengerjaan				16.828.519.858,09	

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas Kesehatan Kab. Jember							
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)	
7		Aset lainnya	8.996	Buah		7.207.243.450,00	
		Jumlah Nilai Aset Tetap				656.749.459.245,96	

Tabel 2.6 diatas menggambarkan jumlah nilai aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dimana pada setiap tahunnya mengalami penyusutan terhadap nilai aset karena faktor keandalan, serta penambahan aset karena pembaharuan.

Tabel 2.7 Rincian Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Kode Bidang	Pembidangan	Jml	Satuan	Nilai (Rp)
1.3.1	Tanah	178	m²	46.095.075.140,00
1.3.1.1	Tanah	178		46.095.075.140,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	27.688	Buah	241.153.656.062,32
	a. Alat - alat Besar	30	Buah	7.884.370.000,00
1.3.2.1	Alat-Alat Besar Darat	2		485.100.000,00
1.3.2.2	Alat-Alat Besar Apung	0		-
1.3.2.3	Alat-alat Bantu	28		7.399.270.000,00
	b. Alat-alat Angkutan	357	Buah	104.163.304.220,00
1.3.2.4	Alat Angkutan Darat Bermotor	355		104.162.180.220,00
1.3.2.5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2		1.124.000,00
1.3.2.6	Alat Angkut Apung Bermotor	0		-
1.3.2.7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0		-
1.3.2.8	Alat Angkut Bermotor Udara	0		-
	c. Alat - alat Bengkel & Alat Ukur	50	Buah	48.000.000,00
1.3.2.9	Alat Bengkel Bermesin	0		-
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	0		-
1.3.2.11	Alat Ukur	50		48.000.000,00
	d. Alat - alat Pertanian/Peternakan	48	Buah	886.186.283,00
1.3.2.12	Alat Pengolahan Pertanian	13		348.260.000,00

Kode Bidang	Pembidangan	Jml	Satuan	Nilai (Rp)
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	35		537.926.283,00
	e. Alat - alat Kantor & Rumah Tangga	14.534	Buah	52.272.811.356,53
1.3.2.14	Alat Kantor	3.606		10.172.934.228,00
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	8.107		21.588.510.048,53
1.3.2.16	Peralatan Komputer	2.711		20.404.519.588,00
1.3.2.17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	110		106.847.492,00
	f. Alat - alat Studio & Kemonikasi	674	Buah	3.660.560.593,00
1.3.2.18	Alat Studio	154		1.651.037.493,00
1.3.2.19	Alat Komunikasi	520		2.009.523.100,00
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	0		-
	g. Alat - alat Kedokteran	10.911	Buah	58.117.291.354,32
1.3.2.21	Alat Kedokteran	6.818		41.812.780.798,716
1.3.2.22	Alat Kesehatan	4.093		16.304.510.555,60
	h. Alat - alat Laboratorium	1.072	Buah	13.963.590.255,47
1.3.2.23	Unit-Unit Laboratorium	285		7.856.927.155,00
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10		59.999.000,00
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0		-
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0		-
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0		-
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0		-
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0		-
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	777		6.046.664.100,4700
	i. Alat - alat Keamanan	12	Buah	157.542.000,00
1.3.2.31	Senjata Api	0		-
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	0		-
1.3.2.33	Alat Keamanan dan Perlindungan	12		157.542.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	355	Unit	342.876.665.235,55
	a. Bangunan Gedung	355	Unit	342.876.665.235,55
1.3.3.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	292		334.365.998.143,51
1.3.3.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	63		8.510.667.092,04
1.3.3.3	Bangunan Menara	0		-

Kode Bidang	Pembidangan	Jml	Satuan	Nilai (Rp)
	Bangunan Monumen	0		-
1.3.3.4	Bangunan Bersejarah	0		-
1.3.3.5	Tugu Peringatan	0		-
1.3.3.6	Candi	0		-
1.3.3.7	Monumen/Bangunan Bersejarah	0		-
1.3.3.8	Tugu Peringatan Lain	0		-
1.3.3.9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0		-
1.3.3.10	Rambu-Rambu	0		-
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0		-
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14	Unit	2.532.421.100,00
	Jalan dan Jembatan	0		-
1.3.4.1	Jalan	0		-
1.3.4.2	Jembatan	0		-
	Bangunan air / Irigasi	0		-
1.3.4.3	Bangunan Air Irigasi	0		-
1.3.4.4	Bangunan Air Pasang Surut	0		-
1.3.4.5	Bangunan Air Rawa	0		-
1.3.4.6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0		-
1.3.4.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0		-
1.3.4.8	Bangunan Air Bersih/Baku	0		-
1.3.4.9	Bangunan Air Kotor	0		-
1.3.4.10	Bangunan Air	0		-
	Instalasi	9	Unit	2.116.216.300,00
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	1		12.000.000,00
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	4		2.084.466.300,00
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	0		-
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0		-
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	0		-
1.3.4.16	Instalasi Gardu Listrik	4		19.750.000,00
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	0		-
1.3.4.18	Instalasi Gas	0		-
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	0		-
	Jaringan	5	Unit	416.204.800,00
1.3.4.20	Jaringan Air Minum	0		-

Kode Bidang	Pembidangan	Jml	Satuan	Nilai (Rp)
1.3.4.21	Jaringan Listrik	2		5.500.000,00
1.3.4.22	Jaringan Telepon	3		410.704.800,00
1.3.4.23	Jaringan Gas	0		-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	125	Buah	55.878.400,00
	Buku Perpustakaan	103	Buah	24.383.400,00
1.3.5.1	Buku	103		24.383.400,00
1.3.5.2	Terbitan	0		-
1.3.5.3	Barang-Barang Perpustakaan	0		-
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	22	Buah	31.495.000,00
1.3.5.4	Barang Bercorak Kebudayaan	22		31.495.000,00
1.3.5.5	Alat Olah Raga Lainnya	0		-
	Hewan Ternak & Tumbuhan	0		-
1.3.5.6	Hewan	0		-
1.3.5.7	Tanaman	0		-
1.3.5.8	aset renovasi	0		-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0		16.828.519.858,09
1.3.6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan			16.828.519.858,09
1.3.6.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Peralatan			-
1.3.6.3	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung			-
1.3.6.4	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan / jembatan / irigasi			-
TOTAL ASET TETAP		28.360		649.542.215.795,96
1.3.7	ASET LAINNYA	8.996		7.207.243.450,00
1.3.7.1	a. Piutang Angsuran	0		-
1.3.7.2	b. Aset telah dihibahkan	0		-
1.3.7.3	c. Peralatan mesin rusak	8.543	Buah	4.520.848.521,00
1.3.7.4	d. Aset tak berwujud	3	Buah	664.232.500,00
1.3.7.5	e. Aset lain-lain	450	Buah	2.022.162.429,00
1.3.7.6	f. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0		-
1.3.7.7	g. BLUD	0		-
TOTAL ASET		37.356		656.749.459.245,96

Tabel 2.8 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember

No	Sarana Pelayanan	Jumlah
1	RSD	3
2	RS swasta/BUMN/Polri	8
3	RS Gigi dan Mulut	1

No	Sarana Pelayanan	Jumlah
4	RS Provinsi	1
3	Puskesmas	50
5	Puskesmas Perawatan	43
6	Puskesmas Non Perawatan	7
7	Puskesmas PONED	25
8	Puskesmas Terakreditasi	50
9	Puskesmas Pembantu	131
10	Puskesmas Keliling roda empat	50
11	Poskesdes	72
12	Polindes	75
13	Rumah Bersalin	-
14	Balai Pengobatan/Klinik	69
15	Praktik dokter bersama	
16	Praktik dokter perorangan	
17	Praktik pengobatan tradisional	1464
18	Apotek	
	JUMLAH	2049

Pada Tabel 2.7, Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Kesehatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2021 sebesar Rp 656.749.459.245,96 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah). Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Jember

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat		
								Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1252	1997	Jl. Srikoyo I/3 Jember	-	-	2173	KANTOR DINAS KESEHATAN
	Tanah Bang	-	1	1	1997	Jl. Perumnas Patrang	-	-	-	GUDANG DIKES

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat		
								Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	unan Gedung									
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	4774	1997	Kelurahan Bintoro	-	-	4439/1997	KANTOR DINAS KESEHATAN
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	605	1989	DS. KLOMPANGAN	HAK PAKAI NO. 5	3278	3785/1990	PUSTU KLOMPANGAN
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1955	1992	Jln.Jend. A Yani No 56 Ambulu	HAK PAKAI	-	-	PUSKES MAS & RUDIN
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	150	1985	-	HAK PAKAI	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	2562	1985	-	HAK PAKAI	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1961	1989	DS. CANDIJATI	HAK PAKAI NO.2	3276	4256/1989	PUSKES MAS INDUK
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	170	1979	ARJASA	HAK PAKAI	-	-	PUSTU
	Tanah Bang	-	1	483	1979	BITING	HAK PAKAI	-	-	PUSTU

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat		
								Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	unan Gedung									
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	483	1979	DARSO NO	HAK PAKAI	-	-	PUSTU
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1330	1989	DS. ARJASA	HAK PAKAI NO 4	3276	4255/1989	PUSTU ARJASA
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	323	1989	-	HAK PAKAI	-	-	RUMAH DINAS DOKTER
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	96	2007	ARJASA	HAK PAKAI	-	-	UGD
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1000	0	DS. BALUNG LOR	-	-	-	PUSKES MAS & RUDIN DOKTER
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	40	0	DS. BALUNG KULON	-	-	-	PUSTU
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	960	1989	DS. BANGS ALSARI	HAK PAKAI NO.8	3278	4431/1989	PUSKES MAS INDUK
	Tanah Bang	-	1	882	0	-	-	-	-	-

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat		
								Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	unan Gedung									
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	133	0	-	-	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	108	0	-	-	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	130	0	-	-	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	177000	1990	CAKRU	HAK PAKAI	-	-	PUSKES MAS INDUK
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1612	1984	-	HAK PAKAI	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	5000	1984	-	HAK PAKAI	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	454	1979	-	HAK PAKAI	-	-	PUSKES MAS INDUK
	Tanah Bang	-	1	2108	1994	DS. MENAM PU	HAK PAKAI NO. 2	3459	4095/1994	PUSTU MENAM PU

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat		
								Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	unan Gedung									
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	166	0	DS. MENAM PU	-	-	-	PUSTU
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	340	0	DS. MAYANGAN	-	-	-	PUSTU
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	64	0	DS. GUMUK MAS	-	-	-	PUSTU
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	473	2005	DS. JELBUK	HAK PAKAI	-	07/JELBUK/2005	PUSKES MAS INDUK
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	112	0	JL. KH. SHIDDI Q NO.78	-	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1000	0	JL. KH. SHIDDI Q NO.78	-	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	64	1992	JL. KENANGA	HAK PAKAI	-	-	-
	Tanah Bang	-	1	783	1992	JL. KH. SHIDDI Q NO.78	HAK PAKAI	-	-	-

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat		
								Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	unan Gedung									
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	4910	1972	KRAJAN DESA	HAK PAKAI	-	-	RUMAH DINAS
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	395	2005	KRAJAN DESA	HAK PAKAI	-	00105/JENGGAWAH/2005	UNIT KANTOR
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	1802	2005	KRAJAN DESA	HAK PAKAI	-	0106/JENGGAWAH/2005	UNIT PELAYANAN
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	395	0	DS. BABATAN	-	-	653033534.2	PUSTU
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	383	0	-	-	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	250	0	-	-	-	-	-
	Tanah Bangunan Gedung	-	1	250	0	-	-	-	-	-
	Tanah Bang	-	1	250	0	-	-	-	-	-

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat		
								Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	unan Gedung									

Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tercatat pada Tabel 2.10 dibawah ini :

Tabel : 2.10
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Jember

Jenis Barang>Nama Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian
1	2	3	4	5	6
Komputer	1	ASUS A6421UKH-WC009T AIO	-	-	2017
Mesin Absen	1	Fingerspot New Hybrid Pro Series	-	-	2017
UPS	1	Wearnes Line Interactive UPS W650E	-	-	2017
MOBIL	1	KJNG INNOVA E XW41	1998	BESI	2011
MOBIL	1	TIMOR - S 515	1498	BESI	2000
MOBIL	1	STRADA CR 2,8A GLX	2835	BESI	2011
MOBIL	1	MITSUBISHI FE 846 BC	3908	BESI	2007
MOBIL	1	MITSUBISHI FE 846 BC	3908	BESI	2007
MOBIL	1	MITSUBISHI FE 846 BC	3908	BESI	2007
MOBIL	1	MITSUBISHI FE 846 BC	3908	BESI	2007
MOBIL	1	MITSUBISHI FE 846 BC	3908	BESI	2007
MOBIL	1	MITSHUBISHI L 200	2835	BESI	2006
MOBIL	1	TBR54 PRLC STD/ PICK UP	2499	BESI	1998
MOBIL	1	DAIHATSU / S93 - ESPASS	1498	BESI	2006
MOBIL	1	DAIHATSU F69 HILINE	2765	BESI	1992
MOBIL	1	TOYOTA INOVA	1998	BESI	2013
MOBIL	1	TOYOTA INOVA	1998	BESI	2013
MOBIL	1	TOYOTA KIJANG	1486	BESI	1991
MESIN KOMPRESOR	1	-	-	BESI	2013

Jenis Barang>Nama Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian
1	2	3	4	5	6
FODIUM	1	-	-	KAYU	1996
KURSI PUTAR KECIL	1	-	-	PLASTIK	1996
KURSI PUTAR BESAR	1	-	-	PLASTIK	1996
ALMARI BESI	1	-	-	BESI	1997
ALMARI BESI	1	-	-	BESI	1997
ALMARI BESI	1	-	-	BESI	1997
ALMARI BESI	1	-	-	BESI	1997
ALMARI BRANKAS	1	-	-	BESI/BAJA	1997
ALMARI BRANKAS	1	-	-	BESI/BAJA	1997
ALMARI BRANKAS	1	-	-	BESI/BAJA	1997
FILLING KABINET	1	-	-	BESI	1997
FILLING KABINET	1	-	-	BESI	1997
FILLING KABINET	1	-	-	BESI	1997
FILLING KABINET	1	-	-	BESI	1997
FILLING KABINET	1	-	-	BESI	1997
FILLING KABINET	1	-	-	BESI	1997
FILLING KABINET	1	-	-	BESI	1997
KIPAS ANGIN	1	-	-	METAL	1997
KIPAS ANGIN	1	-	-	METAL	1997
KOMPUTER	1	-	-	METAL	1997
KURSI PUTAR BESAR	1	-	-	BESI	1997
KURSI PUTAR BESAR	1	-	-	BESI	1997
KURSI PUTAR BESAR	1	-	-	BESI	1997
KURSI STAF	1	-	-	KAYU	1997

Tabel: 2.11
KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Jember

Jenis Barang / Nama Barang	Asal	Harga	Kondisi
----------------------------	------	-------	---------

	Usul		Ba ik	Kura ng Baik	Rus ak Ber at
1	2	3	4	5	6
INSTALASI PENAMPUNG AIR BERSIH	AP BD	12,000,000	B	B	B
INSTALSI LISTRIK	AP BD	19,000,000	B	B	B
INSTALASI INSTALASI LISTRIK	AP BD	250,000	K B	KB	KB
INSTALASI INSTALASI LISTRIK (1)	AP BD	250,000	K B	KB	KB
INSTALASI INSTALASI LISTRIK (2)	AP BD	250,000	K B	KB	KB
JARINGAN GENERATOR LISTRIK	AP BD	4,000,000	B	B	B
JARINGAN JARINGAN LISTRIK	AP BN	1,500,000	K B	KB	KB
Jaringan PABX	AP BD	66,946,000	-	-	-
Code Blue EmergencY	AP BD	164,890,000	-	-	-
PABX AUDIO VISUAL DINAS KESEHATAN	AP BD	178,868,800	-	-	-
Pengadaan instalasi air kotor - IPAL Puskesmas Karangduren	AP BD	523,911,400	B		
Pengadaan instalasi air kotor - IPAL Puskesmas Sukowono	AP BD	522,123,500	B		
Pengadaan instalasi air kotor - IPAL Puskesmas Umbulsari	AP BD	519,421,400	B		
Pengadaan instalasi air kotor - IPAL Puskesmas Sumberbaru	AP BD	519,010,000	B		

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Kesehatan yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 5 Tahun 2022 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Bidang Kesehatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berikut disajikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2017 - 2021

Tabel 2.12 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Usia Harapan Hidup (UHH)				65,90	66,90	67,10	68,20	69,30	64,96	65,96	66,69	67,11	67,32					
2	Angka Kematian Ibu				87,73	87,65	87,00	86,50	85,75	132,5	114,00	133,23	173,59	333,58	66,21	76,89	65,30	49,83	25,71
3	Angka Kematian Bayi				6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	7,85	5,00	9,33	9,22	10,12	76,56	120,20	64,42	65,18	59,39
4	Prevalensi Gizi Buruk				2,20	2,2	2,1	2,1	2,00	2,2	2,33	1,22	3,65	10,98	100,00	94,42	172,13	57,53	18,21
5	Angka Kesakitan Penyakit Menular				14,00	13,00	12,00	12,00	12,00	-	4,05	3,18	2,19	20,90	-	320,99	377,36	547,95	57,42
6	Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular				14,00	13,00	12,00	12,00	12,00	-	7,81	0,04	6,01	26,00	-	166,45	30000	199,67	46,15
7	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				-	B	B	B	B	C	C	C	C	A	-	80	80	80	100
8	Pelayanan kesehatan ibu hamil				100	100	100	100	100		83	74	82	84		83	74	82	84
9	Pelayanan kesehatan ibu bersalin				100	100	100	100	100		95	94	94	96		95	94	94	96
10	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100	100	100	100	100		98	99	96	98		98	99	96	98

11	Pelayanan kesehatan balita				100	100	100	100	100		86	85	80	80		86	85	80	80
12	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				100	100	100	100	100		98	80	91	32		98	80	91	32
13	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				100	100	100	100	100		70	71	55	73		70	71	55	73
14	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut				100	100	100	100	100		58	15	36	27		58	15	36	27
15	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi				100	100	100	100	100		46	50	26	35		46	50	26	35
16	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus				100	100	100	100	100		17	94	79	90		17	94	79	90
17	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				100	100	100	100	100		47	26	50	58		47	26	50	58
18	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				100	100	100	100	100		49	69	83	52		49	69	83	52
19	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV				100	100	100	100	100		77	89	84	80		77	89	84	80
20	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				100	100	100	100	100			30	72	69			30	72	69
21	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi				100	100	100	100	100			92	92	92			92	92	92

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal maka perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/ Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Angka Kematian Ibu pada tahun 2021 masih tinggi dengan capaian sebesar 333,58
- 2) Angka Kematian Bayi masih tinggi pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 10,2

- 3) Peningkatan Prevalensi gizi buruk yang semakin tinggi pada tahun 2021 sebesar 10,98
- 4) Peningkatan angka kesakitan penyakit tidak menular sebesar 26
- 5) Peningkatan angka kesakitan penyakit menular sebesar 20,98
- 6) Kualitas pelayanan Kesehatan ditunjukkan oleh hasil survey kepuasan masyarakat pada kategori A dan harus dipertahankan untuk terus baik.

Tabel 2.13 T-C 24																				
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan																				
Kabupaten Jember																				
Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%
Pendapatan Daerah /Perangkat Daerah	88,317,437,000.00	89,542,262,024.00	86,324,604,275.00	109,288,550,216.20	108,098,377,184.00	114,976,500,000.00	88,377,519,500.00	92,831,788,937.00	96,671,041,358.00	102,449,429,024.00	88,147,531,754.00	67,166,205,275.00	100.07	103.67	111.99	93.74	81.54	58.42	81.70098322	100.2609123
PAD	11,305,448,000.00	12,158,557,275.00	9,312,615,275.00	11,899,960,422.00	9,379,329,000.00	16,257,451,852.00	11,564,767,250.00	13,590,498,000.00	13,293,724,750.00	15,202,730,893.00	10,644,786,504.00	8,460,679,250.00	102.29	111.78	142.75	127.75	113.49	52.04	120.5357867	108.6425477

Tabel 2.13 T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%
Dana Perimbangan / Transfer	-	-	-	-	-	2.247.427.568	-	-	-	-	-	2.247.427.568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	-	-
Lain lain Pendapatan yang sah	77,011,989,000.00	77,383,704,749.00	77,011,989,000.00	97,388,589,794.20	98,719,048,184.00	98,719,048,148.00	76,812,752,250.00	79,241,290,937.00	83,377,316,608.00	87,246,698,131.00	77,502,745,250.00	58,705,526,025.00	99.74	102.40	108.27	89.59	78.51	59.47	78.01127585	99.10971799
Total Pendapatan	88,317,437,000.00	89,542,262,024.00	86,324,604,275.00	109,288,550,216.20	108,098,377,184.00	114,976,500,000.00	88,377,519,500.00	92,831,788,937.00	96,671,041,358.00	102,449,429,024.00	88,147,531,754.00	67,166,205,275.00	100.07	103.67	111.99	93.74	81.54	58.42	81.70098322	100.2609123

Tabel 2.13 T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%
Belanja Daerah/Perangkat Daerah	-	457,005,969,370.64	421,978,775,211.52	526,137,639,040.55	433,737,916,229.96	637.491.456.233	-	342,916,691,855.14	263,666,532,425.01	450,269,724,753.03	333,362,114,979.44	533.241.963.187.38	0.00	75.04	62.48	85.58	76.86	83.64	0	0
Belanja Tdk Langsung	-	135,574,708,573.00	108,392,531,143.00	121,916,670,563.10	130,435,177,453.03	-	-	123,321,271,890.00	102,486,483,075.00	111,304,613,303.00	112,384,187,815.00	-	0.00	90.96	94.55	91.30	86.16	-	0	0
Belanja Operasi	-	-	-	-	-	540.264.642.559	-	-	-	-	-	461.944.834.836.38	-	-	-	-	-	84.61	0	0
Belanja Modal	-	-	-	-	-	94.979.386.106	-	-	-	-	-	69.022.700.783	-	-	-	-	-	77.32	0	0

Tabel 2.13 T-C 24																				
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan																				
Kabupaten Jember																				
Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%
Total Belanja	-	592,580,677,943.64	530,371,306,354.52	648,054,309,603.65	564,173,093,682.99	637.491.456.233	-	466,237,963,745.14	366,153,015,500.01	561,574,338,056.03	445,746,302,794.44	533.241.963.187.38	0.00	78.68	69.04	86.66	79.01	83.64	0	0

Pada Tabel 2.13 T-C 24 dapat diinterpretasikan, bahwa Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Jember mengalami peningkatan, dengan rata-rata Realisasi Anggaran mencapai 80-90%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber anggaran dari Dinas Kesehatan Kab. Jember juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga hal tersebut membantu dalam Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember.

Pada tahun 2019 akhir, pandemi Covid-19 melanda dunia, sehingga pada Tahun 2020 awal Covid-19 dan Tahun 2021 masa penyebaran Covid-19 di Indonesia, hal ini berpengaruh terhadap total belanja yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kab. Jember. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 dalam uraiannya menjabarkan beberapa belanja yaitu Belanja Operasi dengan Pagu Anggaran Rp. 540.264.642.559 dan Realisasi Anggaran Rp. 461.944.834.836,38, sehingga Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021 sebesar 84,61%.

Pada Belanja Modal Pagu Anggaran Rp. 94.979.386.106 dan Realisasi belanja tersebut Rp. 69.022.700.783 sehingga mencapai 77,32% Rasio Realisasinya. Sehingga dapat disimpulkan dalam tabel tersebut rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun 2021 mencapai 83,64% bertumbuh 4,63% dari Tahun 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

a. Kekuatan

- 1) Program Standar pelayanan minimal untuk pelayanan masyarakat miskin sudah berjalan dengan baik;
- 2) Anggaran pembiayaan kesehatan Kabupaten Jember terus meningkat setiap tahunnya;
- 3) Memiliki Jaringan faskes dasar dan lanjutan pemerintah dan swasta yg telah bekerjasama dg BPJS;
- 4) Sudah dibentuk TIM BLUD Dinas Kesehatan Kab Jember guna untuk memberikan pendampingan persiapan Puskesmas BLUD;
- 5) Tersedianya aplikasi rencana kebutuhan Pegawai yang dapat menjadi wadah pengusulan pegawai;
- 6) Mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 khususnya Puskesmas sudah baik dikarenakan semua Puskesmas sudah terakreditasi;
- 7) Tersedianya Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab Jember;
- 8) Selama 5 tahun terakhir prosentase cakupan kunjungan pasien di Puskesmas sudah melebihi target sebesar 15%;
- 9) Kabupaten Jember sudah memiliki 248 Ambulan Desa yang difungsikan untuk mempercepat penanggulangan bencana dan krisis di Kabupaten Jember;
- 10) Kabupaten Jember sudah memiliki Peraturan tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan tradisional empiris dan Dinas Kesehatan sudah mempunyai aturan mengenai pelayanan kesehatan terintegrasi di Puskesmas;
- 11) Puskesmas sudah memiliki tenaga kesehatan dan non kesehatan yang sesuai kompetensi puskesmas Kabupaten Jember sebagai pelaksana program yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan;

b. Kelemahan

- 1) Kebutuhan anggaran untuk pembiayaan miskin melalui Surat Pernyataan Miskin masih tinggi;

- 2) Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang masih belum terpenuhi secara maksimal termasuk SDM dan Sarana Parasarana;
- 3) Puskesmas yang sudah ter Akreditasi dengan status Paripurna hanya terdapat Dua (2) Puskesmas di Kabupaten Jember;
- 4) Angka Kesakitan dan Kematian yang masih tinggi Khususnya terkait dengan Kematian Ibu, Bayi, Stunting serta Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular secara umum;
- 5) TIM Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Dinas Kesehatan masih kurang intensif melakukan pendampingan dan sosialisasi persiapan Puskesmas BLUD;
- 6) Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan masih belum terintegrasi secara optimal;
- 7) SDM di Puskesmas masih belum semuanya selalu mengedepankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien, tercermin dari nilai IKM Puskesmas yang cenderung tidak meningkat signifikan setiap tahunnya;
- 8) Belum semua petugas kesehatan mendapatkan pelatihan/orientasi program, dan hampir semua petugas Puskesmas memiliki beban kerja tinggi karena banyaknya program yang diembannya.

c. Peluang

- 1) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat setiap tahunnya meskipun masih belum mencapai target yang ditentukan.
- 2) Adanya proses Rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah secara berkala;
- 3) Adanya dukungan aktif Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Desa Siaga, Posyandu Lansia, Balita, Polindes, Poskesdes, Bindu Penyakit Tidak Menular dan Jumantik);
- 4) Organisasi profesi senantiasa mendukung implementasi Program/kegiatan Kesehatan di Kabupaten Jember;
- 5) Dukungan penuh kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk peningkatan mutu Puskesmas;
- 6) Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun bertambah menyebabkan permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan juga semakin meningkat;

- 7) Adanya beberapa dukungan Program dari Non Government Organization (NGO) dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam pengimplementasian program kesehatan di Kab. Jember;
- 8) Terdapat Beberapa Kegiatan Lintas Sektor seperti DMPD dan DP3AKB yang dapat diintegrasikan dengan program Kesehatan di Dinas Kesehatan seperti Desa Sehat, BKB, PIK-R dll;
- 9) Dukungan Kementerian Kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Tantangan

- 1) Terdapat persaingan pelayanan kesehatan pada faskes tingkat 1 di wilayah dalam pemberian pelayanan kesehatan di masyarakat dikarenakan jumlah Faskes tingkat 1 di wilayah semakin meningkat setiap tahunnya;
- 2) Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang berpotensi bencana di Jawa Timur sehingga diperlukan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dan pemenuhan kesehatan kepada masyarakat;
- 3) Aspek Budaya masyarakat Secara Tidak Langsung dapat mempengaruhi penerimaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah;
- 4) Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah sehingga mengakibatkan tingginya angka kesakitan di masyarakat;
- 5) Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN), tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan sistem lainnya;
- 6) Banyaknya jenis Produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar yang memerlukan perhatian;
- 7) Tingkat resistensi dan stigma masyarakat terhadap program kesehatan tertentu masih tinggi;
- 8) Belum semua kabupaten/kota memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi (masih manual).

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Jember

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Kesehatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 03 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Kesehatan sebagai organisasi adalah sebagai berikut :

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Jember “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kab. Jember

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	1. Sumber Daya Kesehatan masih kurang dalam hal kuantitas, kualitas, distribusi dan produktivitas	1. Jumlah tenaga kesehatan dan penunjang yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat sehingga pelayanan kesehatan masih kurang maksimal 2. Kompetensi tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan yang belum maksimal 3. Distribusi Tenaga Kesehatan yang masih belum merata 4. Perbekalan kesehatan belum optimal
		2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) untuk daerah	Masyarakat tidak bisa secara mandiri menjadi peserta JKN dikarenakan pendapatan perkapita yang masih rendah
		3. Alokasi Anggaran kesehatan di luar gaji belum mencapai minimal 10% dari anggaran	Keterbatasan kapasitas fiskal daerah sehingga tidak dapat memenuhi anggaran 10% dari APBD diluar gaji

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		pendapatan dan belanja daerah	
		4. Hasil kinerja puskesmas masih belum maksimal.	Manajemen Puskesmas belum dikelola dengan maksimal.
		5. Belum semua Rumah sakit di Kabupaten Jember terakreditasi	RSGM Fakultas Kedokteran gigi Unej belum terakreditasi, saat ini sedang berproses persiapan sarana dan prasarana dan pendampingan.
		6. Belum optimal dukungan Rumah Sakit terhadap program prioritas (penurunan kematian maternal, balita gizi buruk)	Sistem rujukan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) belum maksimal
		7. Aplikasi rujukan belum terintegrasi /bridging antar fasilitas kesehatan dasar dengan fasilitas kesehatan lanjutan.	Keterbatasan software, skillware dan hardware
		8. Kesadaran penyehat tradisional dalam pengurusan perijinan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait perijinan 2. Penyehat tradisional di kenakan biaya oleh ASOSIASI untuk mendapatkan rekomendasi sebagai persyaratan perijinan
		9. Belum terbentuknya asuhan mandiri (Asman) di Wilayah	Kurangnya pemahaman dan kompetensi bagi pemegang program tenaga kesehatan tradisional dalam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Puskesmas	asuhan mandiri
		10. Akses Masyarakat terhadap penggunaan jamban masih Rendah	1. Masyarakat kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tidak mampu membangun jamban sehat 2. Kesadaran masyarakat untuk memiliki jamban masih rendah 3. Minimnya budaya masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
		11. Desa yang sudah bebas ODF (<i>Open Defecation Free</i>)/ BABS masih rendah	1. perhatian pemangku kebijakan terhadap permasalahan sanitasi masih rendah 2. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jamban masih rendah
		12. Ketersediaan air minum yang memenuhi syarat masih rendah	Cakupan uji laboratorium air minum masih rendah
2	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular termasuk kesiapsiagaan memitigasi risiko bencana non alam wabah, pandemi, dan epidemi (yang terkait dengan Covid-19)	1. Kurangnya kompetensi SDM tenaga kesehatan pendukung	Sistem Pelatihan, distribusi dan <i>rolling</i> petugas belum terkelola dengan baik
		2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Program PM dan PTM	Penyediaan Sarana Parasarana Pm dan PTM (alat pemeriksaan dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan
		3. Belum tercapainya	Belum maksimalnya penerapan strategi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		angka penemuan kasus PM dan PTM	program PM dan PTM serta kurang adanya integrasi program serta rendahnya komitmen lintas sektor
		4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan	1. Belum ada sanksi yang tegas bagi pelanggar protokol Kesehatan 2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait bahaya covid 19
		5. Belum optimalnya kegiatan <i>tracing</i> dan <i>testing</i>	Adanya stigma negatif di kalangan masyarakat sehingga pasien covid kurang terbuka saat dilakukan penyelidikan epidemiologi
3	Tingginya angka AKI/AKB	1. Sinergi antar OPD dan swasta dalam pencegahan dan penanganan stunting masih kurang dan Kurang sinergisnya layanan KIA dari hulu sampai ke hilir (FKTP, rujukan dan FKTL)	1. Belum adanya Peraturan Bupati untuk dijadikan pedoman layanan yang sinergis dan terintegrasi 2. Keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan AKI-AKB dan stunting belum optimal 3. Tim monitoring penakib belum terbentuk untuk tahun 2021
		2. Kepatuhan SOP ANC PNC petugas di wilayah masih rendah	Sistem monitoring layanan yang masih lemah, dikarenakan banyaknya faskes dan luasnya wilayah sehingga perlu dilakukan pembagian kelompok moniting dan Teknik monitoring yang sistematis
		3. Tingginya kasus	1. Informasi terkait rencana layanan dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		kesulitan rujukan pada ibu yang seharusnya dirujuk	tatalaksana rencana persalinan belum bisa diterima sepenuhnya oleh sasaran ibu hamil 2. Kurang koordinasi tim muspika di masing-masing kecamatan terkait permasalahan yang dialami oleh ibu hamil
		4. Rujukan kasus bumil risti masih sering estafet dari rumah sakit rujukan	1. Banyak rumah sakit yang belum siap melayani kasus kegawat daruratan neonatus dan obgin 2. NICU sering penuh 3. Dokter sp. OG tidak di tempat
		5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data-data kesehatan ibu dan anak	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data-data berbasis <i>software</i>
4	Tingginya stunting	1. Penanganan kurang terintegrasi	1. Perlunya Perbup penanganan <i>stunting</i> yang terintegrasi 2. Penanganan layanan yang belum terintegrasi antar OPD dan wilayah
		2. Kualitas data <i>stunting</i> masih belum maksimal	1. SOP yang belum seragam 2. Kurangnya peralatan antropometri yang memadai di semua posyandu
5	Belum Optimalnya Satu Data Kesehatan Terintegrasi	1. Setiap Institusi baik masih memiliki sistem informasi yang berbeda-beda	1. Belum adanya keterpaduan/keterkaitan tujuan penggunaan data kesehatan 2. Pelaksanaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan tujuan yang sama	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan masih bersifat ego sektoral
6	Belum Optimalnya Antusiasme dan Dukungan Masyarakat, Kelompok usaha dan OPD Lintas Sektor berkaitan dengan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan	1. Kualitas SDM dan Dukungan Lintas Sektor masih belum optimal	1. Belum tersedianya tenaga yang optimal untuk penanganan penerbitan sertifikat Produksi Pangan 2. Belum adanya Dukuman Masyarakat dan Lintas Sektoral dalam pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu :

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan

ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember :



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah :

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
2. **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
3. **Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**
4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke- 5** yaitu; *Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi* dengan tujuan:

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator sasaran: **IPM Kesehatan-Usia Harapan Hidup (UHH)**.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Wajib Kesehatan menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan Indikator tujuan: IPM Kesehatan-Usia Harapan Hidup (UHH).

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Wajib Kesehatan dengan sasaran :
 - 1) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
Dengan Indikator :
 - a) Angka Kematian Ibu (AKI)
 - b) Angka Kematian Bayi (AKB)
 - c) Persentase Balita Stunting

- 2) Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Dengan Indikator :“Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular”
- 3) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Dengan Indikator : “Indeks kepuasan Masyarakat”

Tabel 3.2
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jember	Permasalahan Pelayanan SKPD/OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi : Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”				
	<p>Misi 5 : Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.</p> <p>Tematik : Wes Wayahe SDM Jember Unggul Program Unggulan : Kesehatan (Gemar Jelita, wes wayahe Jember bangga, Jember Safety Center, Revitalisasi RSUD)</p>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu pelayanan baik karena seluruh Puskesmas sudah terakreditasi 2. Tersedianya Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab Jember 3. Sarana di seluruh Puskesmas sudah tercukupi dan sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas yang sudah ter Akreditasi Paripurna hanya masih terdapat 2 Puskesmas saja 2. Pandemi Covid-19 ini membuat pembinaan TPCB hanya dapat dilakukan melalui daring 3. Prasarana dan Alkes Sebagian besar di Puskesmas masih belum sesuai standar
		Prevalensi Stunting dan Gizi Masyarakat yang masih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan kebijakan prioritas pembangunan nasional,terkait dengan upaya percepatan pencegahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kolaborasi dan keterlibatan lintas sector dalam pencegahan stunting

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jember	Permasalahan Pelayanan SKPD/OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>stunting</p> <p>2. Telah merumuskan kebijakan yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah</p>	
		Meningkatnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular	<p>1. Semua Puskesmas sudah ada petugas yang menjadi penanggungjawab program</p> <p>2. Memiliki potensi anggaran kegiatan dari berbagai sumber</p> <p>3. Kegiatan dapat dikolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor</p>	<p>1. Belum semua petugas kesehatan mendapatkan pelatihan/orientasi program, dan hampir semua petugas Puskesmas memiliki beban kerja tinggi karena banyaknya program yang diembannya</p> <p>2. Realisasi anggaran yang rendah akibat tugas ganda atau kegiatan lain yang menyita waktu</p> <p>3. Kurangnya koordinasi lintas program yang sebenarnya dapat dikolaborasi dan berjalan bersama</p>
		Tingginya AKI dan AKB	1. Kab. Jember sudah memiliki Rencana Aksi Daerah terkait	1. Belum optimalnya monitoring yang dilakukan

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jember	Permasalahan Pelayanan SKPD/OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan penanganan AKI dan AKB 2. Sudah diakomodir terkait dengan penganggaran kesehatan untuk penanggulangan AKI dan AKB di Kab. Jember dari berbagai sumber anggaran termasuk upaya kesehatan yang akan dilakukan	dengan melibatkan peran lintas sector serta masyarakat 2. Edukasi kepada masyarakat masih belum optimal sehingga perlu di maksimalkan dengan memanfaatkan akses dan pelayanan kesehatan di wilayah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Kesehatan dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan memiliki Visi sejalan dengan Visi Presiden RI yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong”. Untuk mencapai visi tersebut, memiliki misi yaitu meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas, Tujuan, Sasaran, dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Sasaran
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi Masyarakat	1. Persentase bumil KEK dari 17,3% menjadi 10%

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
			2. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95% 3. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota 4. Persentase balita <i>stunting</i> dari 27,7% menjadi 14% 5. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60% 6. Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif dari 51% menjadi 100% 7. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50% 8. 100% kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514) 9. kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	1. Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas 2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100% 3. Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100% 4. Persentase RS terakreditasi sebesar 100%

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
			5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024 2. Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024 3. Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota 4. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengka sebanyak 95 % 5. Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 kabupaten/kota 6. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	1. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 96%
		5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83% 2. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
			lainnya sebesar 90% (<i>minimal 4 spesialis dasar wajib ada</i>) sebesar 90% 3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang 4. Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%
		6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN sebesar 5,5%
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100% 2. Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100% 3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58 4. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95 5. Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)
		8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
		untuk pengambilan keputusan	dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi 2. Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan sebanyak 100 SIK

Sesuai Tujuan Kementerian Kesehatan yakni :

- 1) Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
- 2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 4) Peningkatan sumber daya kesehatan
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif menyelenggarakan pembangunan bidang Kesehatan

untuk mendukung layanan infrastruktur dasar bidang kesehatan guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia, hal tersebut akan dapat dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi Masyarakat
- b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- e. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- f. Terjaminnya pembiayaan kesehatan

- g. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- h. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya

No	Sasaran Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan SKPD/OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong”				
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi Masyarakat	Tingginya angka kematian ibu, bayi dan prevalensi stunting	Adanya tim penanganan kesehatan keluarga di Kabupaten Jember	Tanaga kesehatan, sarana dan prasarana belum sesuai standar
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Sarana dan Prasarana belum maksimal serta belum ada regulasi terkait akreditasi	Mutu pelayanan baik karena seluruh Puskesmas sudah terakreditasi	Budaya menjaga mutu di Puskesmas belum terbentuk dengan baik
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Kurangnya koordinasi lintas program yang sebenarnya dapat dikolaborasikan dan berjalan bersama	Intervensi kegiatan yang beragam membuat tujuan program dapat disampaikan ke masyarakat dengan kondisi apapun dan sasaran siapapun serta dapat beradaptasi dalam segala kondisi	Minim pemahaman akulturasi budaya di Jember dapat mengakibatkan adanya salah paham atau persepsi bahkan tujuan informasi tidak dapat tersampaikan dengan utuh.
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Kefarmasian dan alat kesehatan masih belum memiliki sistem terintegrasi	Proses pencatatan dan pelaporan sistem berbasis informasi mulai berjalan	Jumlah pengelola, dan Sulitnya mendapatkan software SIM Obat yang handal dan bisa berkelanjutan

No	Sasaran Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan SKPD/OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Pembatasan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah baik dari sisi jumlah dan jenisnya	Adanya proses Rekrut pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah	Pembatasan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah baik dari sisi jumlah dan jenisnya
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Jumlah dan jenis SDM pengelola dana Kapitasi di Puskesmas yang masih belum memadai	Jumlah Dana Pembiayaan kesehatan Yang besar	Regulasi dari kementerian tentang pemanfaatan dana untuk pembiayaan kesehatan yang kurang aplikatif
7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Belum ada integrasi data antara pemerintah pusat dengan daerah	Focus penyelesaian masalah kesehatan yang sama	Masih belum tersedianya beberaparegulasi di tingkat daerah
8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Integrasi sistem informasi kesehatan masih belum terlaksana	Sudah ada beberapa aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh daerah	Kepentingan prioritas data antara daerah dan pusat masih belum sejalan

3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Salah satu Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur periode 2019 - 2024 adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”, yang diukur dengan indikator “indeks kesehatan”. Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dengan indikator “Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah”
- 2) Meningkatkan status kesehatan keluarga dengan indikator “Angka Harapan Hidup”
- 3) Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator “Presentase RS yang Terakreditasi Paripurna”

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita

yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

- 1) Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 2) Penurunan Prevalensi penyakit menular utama (HIV/ AIDS dan TB)
- 3) Penurunan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
- 4) Penurunan AKI dan AKB
- 5) Penurunan Prevalensi stunting
- 6) Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak rendah dan Peningkatan kabupaten/kota dengan status ODF
- 7) Pemaksimalan Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga
- 8) Peningkatan Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal
- 9) Peningkatan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Timur

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD/OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Kinerja pelayanan kesehatan masih belum maksimal	Pelayanan Kesehatan berbasis kinerja	Masih belum ada pemantapan terkait pemaksimalan kinerja perangkat daerah melalui inovasi dan integrasi kerja

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD/OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya status kesehatan keluarga	Kinerja status kesehatan keluarga masih belum mencapai target yang ditentukan	Koordinasi lintas program belum terpadu	SDM Kesehatan belum memadai 2. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai 3. Sistem Rujukan belum optimal 4. Pembiayaan Kesehatan masih kurang
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih kurang untuk mempersiapkan Universal Health Coverage pada Tahun 2019	Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat	Kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terbatas untuk mencapai kelas akreditasi

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan industri dan perdagangan serta peningkatan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementrian Kesehatan, dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Sebagaimana kebijakan kementerian kesehatan untuk menjawab tantangan global bahwa saat ini peningkatan derajat kesehatan melalui pendekatan upaya kesehatan perlu di lakukan secara masif sehingga dapat mendongkrak peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya untuk memenuhi

kebutuhan akan pencapaian SPM dan SDG's dan isu kesehatan global lainnya. Berdasarkan hal diatas maka kebijakan tersebut dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing - masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah. Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari yang mempunyai fungsi utama salah satunya yaitu sebagai pusat kesehatan.

Dalam rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim

jaringan transportasi laut, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistem jaringan prasarana energi, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lingkungan. Khusus sistem jaringan prasarana lingkungan terdapat sistem pengelolaan limbah yang memiliki tujuan yaitu peningkatan akses Pengembangan Sistem (PS) air limbah baik sistem on site maupun *off site* (terpusat) di perkotaan maupun perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan wajib pemerintahan bidang kesehatan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ditinjau dari Implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Upaya Kesehatan Lingkungan	Berfokus pada kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola limbah dengan baik	Masih rendahnya tingkat tindakan masyarakat tentang penanganan limbah
2.	Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Berfokus pada kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dengan memilah dan memilah jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan	Masih rendahnya tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal

		masyarakat	
--	--	------------	--

Pada Tabel 3.5 diatas perlunya berkolaborasi dan pemberdayaan bersama dengan masyarakat di Kabupaten Jember sehingga harapannya mampu meningkat derajat kesehatan masyarakat sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan lingkungan, kelestarian lingkungan tempat tinggal dan nilai-nilai estetik lingkungan.

3.5.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek *deliberative* artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait. Bidang kesehatan memiliki beberapa isu strategis yang dimunculkan dari kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Jember. Beberapa isu strategis yang mesti mendapatkan langkah tindak lanjut diantaranya adalah :

- a. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan masih rendah;
- b. Biaya kesehatan masih belum terjangkau masyarakat;
- c. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas;

- d. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) relatif masih tinggi;
- e. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang berdampak pada kesehatan masyarakat;
- f. Belum optimalnya penanganan gizi buruk yang mengarah pada kejadian Stunting.

Dalam melaksanakan penanggulangan beberapa isu kesehatan yang muncul pada KLHS Kabupaten Jember, maka pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan telah merencanakan beberapa program dalam rencana strategis dinas

kesehatan kabupaten jember tahun 2021-2026. Beberapa program yang akan dilakukan adalah :

- a. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan masih lemah : akan ditindaklanjuti dengan beberapa program inovasi diantaranya Program Inovasi J-Germas (Gema Cermat) membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat serta mampu menciptakan budaya masyarakat hidup sehat, program promosi kesehatan dan Inovasi J-Bhakti Hatra Kueren.
- b. Biaya kesehatan masih belum terjangkau masyarakat : akan ditindaklanjuti dengan program Inovasi J-Pelayanan Kesehatan Gratis Pasti Keren yaitu menggratiskan biaya pemeriksaan untuk kelas III khusus bagi masyarakat ber KTP Jember.
- c. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas : akan ditindaklanjuti dengan program Inovasi Layanan Prima PSC 119 dengan meningkatkan akses pelayanan kegawatdaruratan Medis serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah.

- d. Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) relatif masih tinggi : akan ditindaklanjuti dengan program Inovasi J-Gemar Jelita (Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu dan Balita).
- e. Pandemi COVID-19 : akan ditindaklanjuti dengan program J-Vaksin Keliling (*door to door*) dengan sasarannya masyarakat umum, lansia dan anak-anak sehingga akan mampu meningkatkan target capaian vaksin di Kabupaten Jember sebesar 70%.
- f. Belum optimalnya penanganan gizi buruk yang mengarah pada kejadian Stunting : akan ditindaklanjuti dengan program Inovasi J-Wes Wayahe Jember Sehat dengan pemeriksaan balita stunting supaya terdeteksi secara dini penemuan dan penanganan dini balita stunting.

Sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Jember pada akhir tahun 2022 adalah mengatasi masalah pokok kesehatan yaitu kematian ibu dan bayi, gizi, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, imunisasi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta jaminan asuransi kesehatan masyarakat melalui pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDG's) yang dapat diukur melalui indikator kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan target 100%;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan target 100%;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan target 100%;
4. Pelayanan Kesehatan Balita dengan target 100%;
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dengan target 100%;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dengan target 100%;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dengan target 100%;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan target 100%;

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Militus dengan target 100%;
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dengan target 100%;
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan target 100%; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia yang bersifat peningkatan promotif dan preventif dengan target 100%.

Pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, desa tertinggal serta daerah bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender.

3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Program Standar pelayanan minimal untuk pelayanan masyarakat miskin sudah berjalan dengan baik;
- b. Anggaran pembiayaan kesehatan Kabupaten Jember terus meningkat setiap tahunnya;
- c. Memiliki Jaringan faskes dasar dan lanjutan pemerintah dan swasta yg telah bekerjasama dg BPJS;
- d. Sudah dibentuk TIM BLUD Dinas Kesehatan Kab Jember guna untuk memberikan pendampingan persiapan Puskesmas BLUD;
- e. Tersedianya aplikasi rencana kebutuhan Pegawai yang dapat menjadi wadah pengusulan pegawai;

- f. Mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 khususnya Puskesmas sudah baik dikarenakan semua Puskesmas sudah terakreditasi;
- g. Tersedianya Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab Jember;
- h. Selama 5 tahun terakhir prosentase cakupan kunjungan pasien di Puskesmas sudah melebihi target sebesar 15%;
- i. Kabupaten Jember sudah memiliki 248 Ambulan Desa yang difungsikan untuk mempercepat penanggulangan bencana dan krisis di Kabupaten Jember;
- j. Kabupaten Jember sudah memiliki Regulasi tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan tradisional empiris dan Dinas Kesehatan sudah mempunyai aturan mengenai pelayanan kesehatan terintegrasi di Puskesmas;
- k. Puskesmas sudah memiliki tenaga kesehatan dan non kesehatan yang sesuai kompetensi puskesmas Kabupaten Jember sebagai pelaksana program yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- l. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat setiap tahunnya meskipun masih belum mencapai target yang ditentukan.
- m. Adanya proses Rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah secara berkala;
- n. Adanya dukungan aktif Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Desa Siaga, Posyandu Lansia, Balita, Polindes, Poskesdes, Bindu Penyakit Tidak Menular dan Jumantik);
- o. Organisasi profesi senantiasa mendukung implementasi Program/kegiatan Kesehatan di Kabupaten Jember;

- p. Dukungan penuh kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk peningkatan mutu Puskesmas;
- q. Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun bertambah menyebabkan permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan juga semakin meningkat;
- r. Adanya beberapa dukungan Program dari Non Government Organization (NGO) dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam pengimplementasian program kesehatan di Kab. Jember;
- s. Terdapat Beberapa Kegiatan Lintas Sektor seperti DMPD dan DP3AKB yang dapat diintegrasikan dengan program Kesehatan di Dinas Kesehatan seperti Desa Sehat, BKB, PIK-R dll;
- t. Dukungan Kementerian Kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Kebutuhan anggaran untuk pembiayaan maskin melalui Surat Pernyataan Miskin masih tinggi;
- b. Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang masih belum terpenuhi secara maksimal termasuk SDM dan Sarana Parasarana;
- c. Puskesmas yang sudah ter Akreditasi dengan status Paripurna hanya terdapat Dua (2) Puskesmas di Kabupaten Jember;
- d. Angka Kesakitan dan Kematian yang masih tinggi Khususnya terkait dengan Kematian Ibu, Bayi, Stunting serta Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular secara umum;
- e. TIM Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Dinas Kesehatan masih kurang intensif melakukan pendampingan dan sosialisasi persiapan Puskesmas BLUD;

- f. Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan masih belum terintegrasi secara optimal;
- g. SDM di Puskesmas masih belum semuanya selalu mengedepankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien, tercermin dari nilai IKM Puskesmas yang cenderung tidak meningkat signifikan setiap tahunnya;
- h. Belum semua petugas kesehatan mendapatkan pelatihan/orientasi program, dan hampir semua petugas Puskesmas memiliki beban kerja tinggi karena banyaknya program yang diembannya;
- i. Terdapat persaingan pelayanan kesehatan pada faskes tingkat 1 di wilayah dalam pemberian pelayanan kesehatan di masyarakat dikarenakan jumlah Faskes tingkat 1 di wilayah semakin meningkat setiap tahunnya;
- j. Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang berpotensi bencana di Jawa Timur sehingga diperlukan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dan pemenuhan kesehatan kepada masyarakat;
- k. Aspek Budaya masyarakat Secara Tidak Langsung dapat mempengaruhi penerimaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah;
- l. Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah sehingga mengakibatkan tingginya angka kesakitan di masyarakat;
- m. Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN), tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan sistem lainnya;

- n. Banyaknya jenis Produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar yang memerlukan perhatian;
- o. Tingkat resistensi dan stigma masyarakat terhadap program kesehatan tertentu masih tinggi;
- p. Belum semua kabupaten/kota memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi (masih manual).

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Jember dan berbagai isu dan kebijakan kesehatan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan kesehatan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Jember.

2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan Kabupaten Jember lainnya.
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Jember di berbagai bidang.
4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kabupaten Jember,
5. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kabupaten Jember.
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten Jember yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Adapun Isu Strategis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah :

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)
2. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular termasuk kesiapsiagaan memitigasi risiko bencana non alam wabah, pandemi, dan epidemi (yang terkait dengan Covid-19)
3. Tingginya angka AKI/AKB di Kabupaten Jember
4. Tingginya Kejadian Stunting
5. Belum Optimalnya Satu Data Kesehatan Terintegrasi
6. Belum Optimalnya Antusiasme dan Dukungan Masyarakat, Kelompok usaha dan OPD Lintas Sektor berkaitan dengan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan.

Dalam menetapkan isu - isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut :

Tabel: 3.7

Rumusan Kreteria Penentuan Isu - isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD

atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

- 1) Dibahas melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
- 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
- 3) Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.8
Penetapan Isue - isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	25	25	20	15	15	100
2	Tingginya angka AKI/AKB di Kabupaten Jember	25	25	20	15	15	100
3	Tingginya Kejadian Stunting	25	25	20	15	15	100
4	Belum Optimalnya Antusiasme dan Dukungan Masyarakat, Kelompok usaha dan OPD Lintas Sektor berkaitan dengan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan	25	25	20	0	0	70
5	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular termasuk kesiapsiagaan memitigasi risiko bencana non alam wabah,	25	25	20	15	0	85

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
	pandemi, dan epidemi (yang terkait dengan Covid-19)						
6	Belum Optimalnya Satu Data Kesehatan Terintegrasi	25	25	20	0	15	85

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan di tabel 3.7 dapat disampaikan bahwa issue strategis yang mendapatkan nilai pembobotan tertinggi dengan nilai 100 yaitu Tingginya angka AKI/AKB di Kabupaten Jember, Tingginya Kejadian Stunting, Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP) sedangkan isu yang mendapatkan nilai terendah dengan nilai 70 yaitu Belum Optimalnya Antusiasme dan Dukungan Masyarakat, Kelompok usaha dan OPD Lintas Sektor berkaitan dengan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan dikarenakan Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat dan bukan Janji politik yang perlu diwujudkan .

Atas dasar Tabel, Isue isue strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya angka AKI/AKB di Kabupaten Jember
- 2) Tingginya Kejadian Stunting
- 3) Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)
- 4) Belum Optimalnya Satu Data Kesehatan Terintegrasi
- 5) Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular termasuk kesiapsiagaan memitigasi risiko bencana

non alam wabah, pandemi, dan epidemi (yang terkait dengan Covid-19)

- 6) Belum Optimalnya Antusiasme dan Dukungan Masyarakat, Kelompok usaha dan OPD Lintas Sektor berkaitan dengan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 - 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan adalah Misi Ke - 5 yaitu:

“ Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dengan sistem yang terintegrasi”

Atas Misi ke-5 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dengan Indikator : Indeks Pembangunan Manusia Kesehatan

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Wajib Kesehatan yaitu: Usia Harapan Hidup (UHH)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu: Wes Wayahe SDM Jember Unggul dengan :

1. Wes wayahe Jember Gemar Jelita,
2. Wes wayahe Jember bangga Puskesmas BLUD,
3. Wes wayahe Jember Layanan Prima PSC 119,
4. Wes wayahe Revitalisasi RSUD

Tabel 4.1 Penjabaran Program Unggulan Bupati Bidang Kesehatan Wes Wayahe SDM Jember Unggul 2021-2026

No	Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Wes Wayahe jember Gemar jelita					
1	Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya Kualitas	Program Pemenuha	Penyediaan Layanan	Pengelolaan Pelayanan

No	Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	n Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Kesehatan Ibu Hamil
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Wes wayahe Revitalisasi RSUD					
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Wes wayahe Jember bangga Puskesmas BLUD					
3	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Wes wayahe Jember Layanan Prima PSC 119					
4	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan

No	Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			t		

Atas dasar Misi kelima, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan **tugas pokok dan fungsi**, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menetapkan **Tujuan** dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah:

” Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat”

Dengan indikator tujuan : Usia Harapan Hidup (UHH) dan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Persentase Balita Stunting
4. Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Persentase pengelolaan pemenuhan dan pembinaan Sumber daya manusia sesuai standar
6. Persentase pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar
7. Persentase pengelolaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar
8. Persentase Pengelolaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
9. Indeks kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan

Rumusan Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember **”Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”** antara lain sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 - 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita - cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Wajib Kesehatan:

- a. **Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular”,** dengan indikator:
 - 1) Angka Kematian Ibu (AKI)
 - 2) Angka Kematian Bayi (AKB)
 - 3) Persentase Balita Stunting

- 4) Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- b. **Sasaran 2 : “Terlaksananya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar”**, dengan indikator : Persentase pengelolaan pemenuhan dan pembinaan Sumber daya manusia sesuai standar.
- c. **Sasaran 3 : “Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman”**, dengan indikator : Persentase pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar.
- d. **Sasaran 4 : “Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan”**, dengan indikator : Persentase pengelolaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar.
- e. **Sasaran 5 : “Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten”**, dengan indikator :
1. Persentase Pengelolaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan

Gambar: 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”
INDIKATOR	Usia Harapan Hidup (UHH)
URUSAN	Wajib Bidang Kesehatan
SASARAN	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi(AKB) 3. Persentase Balita Stunting 4. Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular
BIDANG PENGAMPU	Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
SASARAN	Terlaksananya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar

INDIKATOR	Persentase pengelolaan pemenuhan dan pembinaan Sumber daya manusia sesuai standar
BIDANG PENGAMPU	Bidang Sumber Daya Kesehatan
SASARAN	Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman
INDIKATOR	Persentase pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar
BIDANG PENGAMPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Bidang Kesehatan Masyarakat 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
SASARAN	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
INDIKATOR	Persentase pengelolaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar
BIDANG PENGAMPU	Bidang Kesehatan Masyarakat
SASARAN	Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengelolaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
BIDANG PENGAMPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Bidang Kesehatan Masyarakat 3. Bidang Pelayanan Kesehatan 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Sekretariat

Adapun target dan indikator dari tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 (Tabel TC-25)

Tabel 4.2 (T-C.25)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu	160	150				
			Angka Kematian Bayi	8,72	8,22				
			Prevalensi Gizi Buruk	12	11,8				
		Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	100%				
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	B	B				
Setelah Perubahan									
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Ibu (AKI)			140	130	120	110
			Angka Kematian Bayi (AKB)			7,72	7,22	6,75	6,22
			Persentase Balita Stunting			11,4	11	10,8	10,4

		Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular			100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase pengelolaan pemenuhan dan pembinaan Sumber daya manusia sesuai standar			91%	92%	93%	95%
	Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Persentase pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar			100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase pengelolaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar			66%	68%	70%	75%
	Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pengelolaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten			92%	94%	96%	98%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan			B	A	A	A

Penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang kesehatan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati - Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan *Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD* adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dukungan kebijakan daerah untuk memprioritaskan industri padat karya semakin bertumbuh dan menjadi penopang penurunan angka pengangguran;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan prosedur penanaman modal sebagai insentif pertumbuhan pelaku usaha;
- 3) Melakukan percepatan koridor investasi daerah melalui bisnis usaha PKBU dan BUMD yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan kapasitas lembaga layanan perijinan dan promosi daerah, melalui infrastruktur teknologi informasi;

Gambar 5.1
 Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
 Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026



Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Kesehatan**

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 5 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut yang terkait dengan Dinas Kesehatan adalah **“Meningkatnya Kualitas Kesehatan**

Masyarakat”, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** dan Sasaran Renstra OPD yaitu :

- 1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 2) Terlaksananya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar
- 3) Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman
- 4) Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
- 5) Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

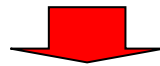
Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih fokus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Kesehatan adalah misi misi 5 RPJMD.

Gambar 5.2
Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan
Strategi Dinas Kesehatan

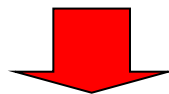
Peta Strategi Dalam RPJMD:

“Membenahi, Sinergi, Kalaborasi dan Akselerasi”



**STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN
DALAM RPJMD:**

1. Melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, terutama pesantren dan majelis taklim
2. Meningkatkan kesadaran pencegahan pernikahan dini
3. Meningkatkan kesadaran pengaturan jarak kelahiran
4. Meningkatkan kualitas dan sarana pelayanan pemeriksaan ibu hamil
5. Meningkatkan kualitas layanan dan penanganan persalinan
6. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi balit
7. Meningkatkan kualitas penanganan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
8. Meningkatkan kualitas penanganan orang dalam gangguan jiwa



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD

1. Meningkatkan dan memelihara kesehatan individu dan keluarga
2. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Peningkatan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar
4. Meningkatkan akses dan mendorong Faskes untuk meningkatkan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sistem terintegrasi
5. Meningkatkan Pengelolaan Keamanan Pangan Daerah

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1 Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Kesehatan memiliki 5 strategi yaitu:

Strategi 1 : Meningkatkan dan Memelihara Kesehatan Individu dan Keluarga

Strategi 2 : Melaksanakan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Strategi 3 : Melaksanakan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar

Strategi 4 : Melaksanakan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar

Strategi 5 : Melaksanakan Percepatan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Strategi 6 : Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten

5.2.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Strategi 1: Meningkatkan dan memelihara kesehatan individu dan keluarga:

- a. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita
- b. Peningkatan akses fasilitas kesehatan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan
- c. Pemeliharaan, pengawasan kualitas lingkungan dan Penyehatan lingkungan.
- d. Penguatan peran Dinkes kab/Kota dalam melakukan Binwasdal terhadap faskes untuk memenuhi standar dan mutu pelayanan
- e. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan

Strategi 2 : Melaksanakan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Peningkatan promotif dan preventif di daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- b. Peningkatan Dekteksi dini masalah kesehatan yang berfokus pada sasaran individu dan keluarga yang berisiko dan berasaskan teknologi
- c. Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
- d. Optimalisasi surveilans dan epidemiologi dan penanggulangan wabah
- e. Penguatan jejaring Pencegahan dan pengendalian PM dan PTM
- f. Perencanaan, pengawasan, dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis data dengan pemanfaatan sistem informasi kesehatan

Strategi 3 : Melaksanakan Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar

- a. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan
- b. Perencanaan dan Analisa kebutuhan SDM berbasis data dengan pemanfaatan sistem informasi Kesehatan terintegrasi

Strategi 4 : Melaksanakan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar

- a. Penguatan faskes dengan pemenuhan dan pemerataan pembiayaan kesehatan, alat kesehatan, kefarmasian sesuai standar
- b. Penguatan peran Dinkes kab/Kota dalam melakukan Binwasdal Institusi pengelolaan pangan
- c. Pemanfaatan Sistem dan optimalisasi peran lintas sektor dalam pengelolaan pengawasan pangan

Strategi 5: Melaksanakan Percepatan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

- a. Memobilisasi masyarakat dalam rangka mendukung UKBM dan menumbuhkembangkan kemitraan dalam upaya Kesehatan
- b. Peningkatan promotif dan preventif untuk kesehatan keluarga di daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat

Strategi 6: Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten

- a. Perencanaan, pengawasan, dan pelaporan program berbasis data dengan pemanfaatan sistem informasi Kesehatan terintegrasi
- b. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yang berbasis kepuasan masyarakat.

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi(AKB) 3. Presentase Balita Stunting 	Meningkatkan dan memelihara kesehatan individu dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita b. Peningkatan akses fasilitas kesehatan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kesehatan c. Pemeliharaan, pengawasan kualitas lingkungan dan Penyehatan lingkungan. d. Penguatan peran Dinkes kab/Kota dalam melakukan Binwasdal terhadap faskes untuk memenuhi standar dan mutu pelayanan e. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan
2			<ol style="list-style-type: none"> 4. Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular 	Melaksanakan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan promotif dan preventif di daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular b. Peningkatan Dekteksi dini masalah kesehatan yang berfokus pada sasaran individu dan keluarga yang berisiko dan berasaskan teknologi c. Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi d. Optimalisasi surveilans dan epidemiologi dan penanggulangan wabah e. Penguatan jejaring Pencegahan dan pengendalian PM dan PTM f. Perencanaan, pengawasan, dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis data dengan pemanfaatan sistem informasi kesehatan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3		Terlaksananya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase pengelolaan pemenuhan dan pembinaan Sumber daya manusia sesuai standar	Melaksanakan peningkatan kualitas dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan b. Perencanaan dan Analisa kebutuhan SDM berbasis data dengan pemanfaatan sistem informasi Kesehatan terintegrasi
4		Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Persentase pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar	Melaksanakan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan faskes dengan pemenuhan dan pemerataan pembiayaan kesehatan, alat kesehatan, kefarmasian sesuai standar b. Penguatan peran Dinkes kab/Kota dalam melakukan Binwasdal Institusi pengelolaan pangan c. Pemanfaatan Sistem dan optimalisasi peran lintas sektor dalam pengelolaan pengawasan pangan
5		Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase pengelolaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar	Melaksanakan Percepatan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memobilisasi masyarakat dalam rangka mendukung UKBM dan menumbuhkembangkan kemitraan dalam upaya Kesehatan b. Peningkatan promotif dan preventif untuk kesehatan keluarga di daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat
6		Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pengelolaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Melaksanakan penunjang urusan pemerintah an daerah kabupaten	Perencanaan, pengawasan, dan pelaporan program berbasis data dengan pemanfaatan sistem informasi Kesehatan terintegrasi Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yang berbasis kepuasan masyarakat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

-
-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 - 2 Output : Segala sesuatu berupa produk/jasa

(Keluaran)	(fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3 Outcome (Hasil)	: Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra “Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 3) Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik kantor
 - 4) Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- f. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bngunan Lainnya
- g. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
- 1) Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- a. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 2) Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 4) Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

- 5) Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin
 - 6) Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - 7) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - 8) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - 6) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
 - 7) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 8) Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi
 - 9) Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- 12) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 13) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 14) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 15) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 16) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 17) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- 18) Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

c. Sub Kegiatan : Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- 1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

d. Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- 2) Sub Kegiatan : Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
 - a. Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 2) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - a. Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 1) Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif terangkum dalam Tabel 6.1 (T-C.27) berikut ini.

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Sebelum Perubahan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ	
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	IPM Kesehatan -Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat																							
			Angka Kematian Ibu (AKI)									173,51	160		150										

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
			Angka Kematian Bayi (AKB)							9,22	8,72		8,22													
			Perse ntase Balita Stunting							12,3	12		11,8													
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN ibu hamil	present ase kesehatan ibu hamil					82%	100%	7.123.579.796,00	75%	7.835.937.775,60												
				UPAYA KESEHATAN ibu bersalin	present ase kesehatan ibu bersalin					94%	100%		100%													
				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN bayi baru lahir	present ase kesehatan bayi baru lahir					96%	100%		100%													
				UPAYA KESEHATAN	present ase kesehatan					80%	100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				AN MAS YAR AKAT	an balita																					
					prosentase cakupan pelayanan lansia					100%	100%		100%													
					prosentase cakupan pelayanan pada usia pendidikan dasar					100%	100%		100%													
					Prersentase Perbaikan Gizi Masyarakat					0%	80%		80%													
					Penyediaan Layanan Kesehatan	Persentase Komplikasi Kebidanan yang				134,91	20% Bumi	7.123.579,796,00	20% Bumi	7.835.937.775,60												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						untuk UKM dan UKP	ditangani																			
						Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif			0%	>70%		>70%													
							Persentase Neonatus Risti yang ditangani			83,85	15% dari kelahiran Hidup		15% dari kelahiran Hidup													
							Persentase kecamatan bebas rawan gizi			64.5%	85%		85%													
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan Status Gizi Ibu Hamil	86.16%	90%	242.000.000,00	90%	266.200.000,00												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Persentase Cakupan K1	100%	100%		100%													
									Persentase Cakupan K4	82%	100%		100%													
									prosentase Ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet	90%	90%		90%													
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persalinan nakes di faskes	94%	100%	6.773.579,796,00	100%	7.450.937.775,60												
									Persentase ibu nifas mendapat vitamin	79%	90%		90%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan Status Gizi Bayi	90.1%	91%	15.000.000,00	92%	16.500.000,00												
									KN Lengkap	96%	100%		100%													
									Prosentase bayi baru lahir mendapat IMD	69%	70%		70%													
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Status Gizi Balita	86%	90%	30.000.000,00	90%	33.000.000,00												
									balita paripurna	80%	100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Persentase bayi 6 bulan mendapat ASI eks	56%	60%		61%													
									Persentase balita mendapat vitamin A 2x dlm setahun	89%	90%		90%													
									Persentase balita yang ditimbang berat badannya	57%	60%		70%													
									Persentase balita yang naik berat badannya	59%	60%		62%													
									Persentase capaian remaja yang dilayani	51.1%	100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Persentase cakupan pemberian TTD Rematri	27%	100%		100%													
									Persentase Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja		50%		54%													
									Persentase cakupan usia pendidikan dasar yang diskriminasi	72%	100%		100%													
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Persentase posyandu Lansia aktif		80%	63.000.000,00	82%	69.300.000,00												
									persentase cakupan kunjungan	50%	100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									n lansia risti																	
									persentase cakupan lansia yang diskriminasi	21.9 %	100%		100%													
		Menurunnya Angka Kesakitan / Kematian, Kecelakaan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular							100%	100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				PROGRAM PENUNJANGAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase cakupan deteksi dini penyakit sesuai target					74%	70%	7.529.601.500,00	75%	8.282.561.650,00												
					Pelayanan kesehatan orang terduga TBC					83%	100%		100%													
					Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh					83%	100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					manusia (Human Immunodeficiency Virus)																					
					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					50%	60%		70%													
					Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					55%	64%		73%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi					26%	41%		56%													
					Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus					78,9%	83%		87%													
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupa	Persentase Puskesmas dengan cakupan tatalaksana penyakit menular dan tidak menular yang ditemukan sesuai standar				100%	100%	7.529.601.500,00	100%	8.282.561.650,00												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						ten/Kota																				
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai target	0	50	7.529.601.500,00	50	8.282.561.650,00												
									Jumlah presentase penemuan kasus penyakit menular sesuai target	73%	70%		75%													
									Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang	93,08	94%		94%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									mendapat imunisasi dasar lengkap																	
									Presentase penyelidikan epidemiologi (PE) KLB	0%	100%		100%													
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan Masyarakat							C	B		B													
				PROGRAM PEMENUHAN UPA	Persentase Kepesertaan JKN-KIS					59%	62%	120.649.228.971,00	65%	132.714.151.868,10												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				YA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kesehatan Lingkungan					3450%	40%		45%													
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan keterseediaan obat, vaksin dan alat kesehatan sesuai standar					0%	65%		65%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					Persentase Puskesmas dan Jaringannya sesuai Standar					0%	100%		100%													
					Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alkes terkalibrasi					6200%	65%		70%													
					Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit						80%		80%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					Persentase Penguatan pelayanan kesehatan tradisional					100%	100%		100%													
					Persentase Penguatan pelayanan kesehatan primer					100%	100%		100%													
					Persentase Penguatan pelayanan kesehatan rujukan					100%	100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerapkan obat rasional			80%	85%	120.649.228.971,00	85%	132.714.151.868,10												
						Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang dilakukan rehabilitasi			0	2		5													
							Persentase pembangunan dan pemenuhan prasarana serta alat kesehatan di rumah sakit				100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ	
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
								Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase Revitalisasi RSD	0	0%		0%												
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas dan Jaringan yang dilakukan pemeliharaan	0%	60%	16.026.918.000,00	65%	17.629.609.800,00											
									Persentase Penambahan Ponkesdes di wilayah Puskesmas	72,00	-		74,00												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
								Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan di rumah sakit	0%	100%	2.000.000,00	100%	2.200.000,00												
								Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang mendapatkan alat kesehatan / penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	50%	75%	76.614.278.546,00	80%	84.275.706.400,60												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Persentase pemenuhan alat kesehatan / alat penunjang medik di rumah sakit sesuai standar	100%	100%		100%													
								Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Puskesmas yang mendapatkan pemeliharannya dan kalibrasi alat kesehatan	75%	75%	21.557.000,00	80%	23.712.700,00												
								Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes yang mendapat	100%	100%	9.421.414.200,00	100%	10.363.555.620,00												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									kan Obat, Vaksin																	
								Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes yang mendapatkan BMHP dan Bahan Laboratorium	100%	100%	16.565.061.225,00	100%	18.221.567.347,50												
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Cakupan Jumlah peserta JKN yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan baik dalam gedung maupun			103,74 / 1000	105 / 1000	275.413.226.051,00	110 / 1000	302.954.548.656,10												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						Daerah Kabupaten/Kota	luar gedung (angka kontak)																			
							Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar			100%	100%		100%													
							Persentase Desa STBM			0%	30%		30%													
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengukuran Kebugaran Kesehatan untuk Jamaah Haji		85%	74.996.000,00	85%	82.495.600,00													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Persentase Pengukuran Kebugaran Kesehatan untuk anak sekolah		30%		30%													
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Prosentase Desa yang SBS (Stop Buang air Besar Sembarangan)		50%	2.565.030.500,00	50%	2.821.533.550,00												
									Prosentase sarana air minum (DAM) yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	78%	55%		55%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ	
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026
											2020	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung	75%	88%		88%												
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Presentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresure	38%	40%	175.201.200,00	50%	192.721.320,00											
									Presentase penyehat tradisional yang memiliki ijin	1%	2%		3%												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ	
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026
											2020	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									Presentase Fasilitas pelayanan Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan integrasi yang sesuai standart	0%	25%		30%												
								Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pembiayaan Kesehatan melalui SPM (blm menjadi peserta JKN)	13300	13300	272.597.998.351,00	12300	299.857.798.186,10											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						Penyele nggaran Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentas e Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi			30%	30%	196.826.500,00	40%	1.000.000,00												
								Pengelola n Sistem Informasi Kesehatan	Persentas e Faskes dengan pengguna an sistem informasi Kesehatan	80%	90%	196.826.500,00	90%	1.000.000,00												
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan	Persentas e pelayanan kesehatan primer sesuai standar			100%	100%	15.147.010.250,00	100%	16.661.711.275,00												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar			100%	100%		100%													
								Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna	4%	4%	8.425.145,800,00	6%	9.267.660.380,00												
									Persentase Klinik Terakreditasi	11%	16%		21%													
									Persentase Puskesmas BLUD	0%	20%		100%													
									Jumlah Pustu Gadar 24 jam yang disediakan		-		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Persentase Kematian pasien ≤ 24 jam di Pelayanan kegawatdaruratan terbatas				≤ 2%													
									Persentase Waktu tanggap pelayanan petugas di Kegawatdaruratan Terbatas (luar gedung)				≤ 7 menit													
									Persentase Indikator Keluarga Sehat Terintegrasi (SEHAT SEMESTA DENGAN	0%	8%		9%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									GERAKAN "KOBOI JEMBER")																	
									Persentase Cakupan Angka Kontak/ Kunjungan Puskesmas	0%	100%		100%													
								Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	92%	100%	6.721.864.450,00	100%	7.394.050.895,00												
									Persentase Terbentuknya PSC 119	0%	100%		100%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Persentase penanggulangan bencana dan krisis kesehatan	100%	100%		100%													
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar					80%	85%	3.925.495,882,00	90	4.318.045.470,20												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dipenuhi	Persentase Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dipenuhi			100%	100%	3.925.495,882,00	100%	4.318.045.470,20												
								Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di	54	54	3.776.020,632,00	54	4.153.622.695,20												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Faskes																	
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki STR dan SIP dan Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai PERMEN KES	80%	100%	149.475.250,00	100%	164.422.775,00												
				PROGRAM SEDI AAN FARMASIAL ALAT KESEHATAN DAN	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Sesuai Standar					90%	90%	533.968.800,00	90%	587.365.680,00												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				MAK ANA N MIN UMA N																						
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang diterbitkan sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertent	Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang diterbitkan			57	100%	533.968.800,00	100%	587.365.680,00												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ	
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						u yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Frekuensi kunjungan ke Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	20	20	533.968.800,00	30	587.365.680,00											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ	
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026
											2020	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
								Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
				PROGRAM PROMOSI KESEHATAN dan pemberdayaan Masyarakat	Persentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat					0%	82%	62.246.269.788,00	82%	68.470.896.766,80											
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0	64%	62.246.269.788,00	68%	68.470.896.766,80											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ		
											2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	/ Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peningkatan UKBM																			
							Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Frekuensi Kegiatan Promosi Kesehatan di dalam dan luar Gedung	78%	80%	62.246.269.788,00	84%	68.470.896.766,80												
									Persentase Kecamatan dan Kabupaten yang menerapkan kebijakan	313%	50%		54%													

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra	Unit Kerja PJ	
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026
											2020	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									Gerakan Masyarakat Hidup Sehat																
									Persentase posyandu Balita aktif	0%	80%		82%												
									Persentase Pembentukan dan pembinaan poskestren dalam rangka upaya promotif dan preventif di Pondok Pesantren	44%	50%		54%												

Tabel 6.2 (T-C.27)
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rutin Dinas Kesehatan Kab. Jember
2021-2026

Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Sasaran 3	Indeks kepuasan Masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usulan Kebutuhan Anggaran Dinas sesuai target/rencana	100%	100%	129,586,852,790.00	100%	142,545,538,069.00												
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	99,055,000.00	100%	108,960,500.00												
				Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan RAPBD SKPD	4	4	99,055,000.00	4	108,960,500.00												
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	125,233,673,315.00	100%	137,757,040,646.50												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2026		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	100%	100%	119,350,619,675.00	100%	131,285,681,642.50											
				Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	100%	100%	5,883,053,640.00	100%	6,471,359,004.00											
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1,737,989,800.00	100%	1,911,788,780.00											
				Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	14,977,500.00	100%	16,475,250.00											
				Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	100%	999,732,500.00	100%	1,099,705,750.00											
				Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik kantor		100%	100%	46,848,000.00	100%	51,532,800.00											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2026		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pencetakan Dokumen dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	99,990,800.00	100%	109,989,880.00											
				Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase makan minum rapat yang dipenuhi	100%	100%	227,087,000.00	100%	249,795,700.00											
				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat di dalam daerah yang diikuti	100%	100%	349,354,000.00	100%	384,289,400.00											
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan	100%	100%	872,595,675.00	100%	959,855,242.50											
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Perlengkapan Surat-Menyurat yang disediakan	100%	100%	30,948,000.00	100%	34,042,800.00											
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	100%	635,998,675.00	100%	699,598,542.50											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2026		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan peralatan kerja yang disediakan	100%	100%	205,649,000.00	100%	226,213,900.00											
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,643,539,000.00	100%	1,807,892,900.00											
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan jabatan yang dilakukan	100%	100%	60,847,500.00	100%	66,932,250.00											
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	100%	632,921,500.00	100%	696,213,650.00											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2026		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bngunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bngunan Lainnya	100%	100%	949,770,000.00	100%	1,044,747,000.00											

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Tabel 6.3 (T-C.27)
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rutin Dinas Kesehatan Kab. Jember

Setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN								Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ				
										2021		2022		2023		2024				2025		2026	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IPM Kesehatan-Usia Harapan Hidup (UHH)									67,32					70,60	Rp. 487,358,425,430,10	71,20	Rp. 511,726,346,702	71,90	Rp. 537,312,664,037	72,40	Rp. 564,178,297,239	72,40	Kepala Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)							333,58					140		130		120		110		110	Kepala Dinas Kesehatan
	Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi (AKB)							10,12					7,72		7,22		6,75		6,22		6,22	Kepala Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Stunting							-					11,40%		11%		10,80%		10,40%		10,40%	Kepala Dinas Kesehatan
		Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular							-					100%		100%		100%		100%		100%	Kepala Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			PROGRAM PEMERINTAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan sesuai standar										100%		100%		100%		100%		100%		Kabid SDK
				Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya sesuai Standar										100%		100%		100%		100%		100%		Kabid Yankes
				Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alkes terkalibrasi dan terpelihara										100%		100%		100%		100%		100%		Kabid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya sesuai Standar								100%		100%		100%		100%			100%	Bid Yankes	
						Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk kab. Jember			69%					70%		75%		75%		75%			75%	Bid Yankes	
						Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			92%					100%		100%		100%		100%			100%	Bid Yankes	
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan							3		3		4		4			5	Bid Yankes

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								Pemeliharaan Oleh Puskesmas																
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya						1	Rp 8.187.626.040	2	Rp 9.006.388.644	2	Rp 9.907.027.508	3	Rp 10.897.730.259	3		Bid Yankes
							Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						6	Rp 37.273.718.033	6	Rp 41.001.089.837	6	Rp 45.101.198.820	6	Rp 49.611.318.702	6		Bid SDK
							Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan						5	Rp 44.000.000	5	Rp 48.400.000	5	Rp 53.240.000	6	Rp 58.564.000	6		Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								n Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center																
							Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan						3	Rp 7.161.633.855	3	Rp 7.877.797.241	3	Rp 8.665.576.965	3	Rp 9.532.134.661	3		Bid SDK
							Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan						3	Rp 8.728.334.998	3	Rp 9.601.168.498	3	Rp 10.561.285.347	3	Rp 11.617.413.882	3		Bid SDK
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						1100	Rp 167.647.000	1200	Rp 184.411.700	1300	Rp 202.852.870	1400	Rp 223.138.157	1400		Bid Yankes
							Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang						50		50		50		50		50		Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpelihara Sesuai Standar																	
							Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						50		50			50			50		50	Bid SDK
									84%					100%		100%			100%			100%		100%	Bid Kesmas
									96%					100%		100%			100%			100%		100%	Bid Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir					98%					100%		100%		100%		100%		100%		Bid Kesmas
				Persentase pelayanan kesehatan balita					80%					100%		100%		100%		100%		100%		Bid Kesmas
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					32%					100%		100%		100%		100%		100%		Bid Kesmas
				Persentase pelayanan kesehatan lansia					73%					100%		100%		100%		100%		100%		Bid Kesmas
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					27%					100%		100%		100%		100%		100%		Bid P2P
				Persentase pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi					35%					100%		100%		100%		100%		100%		Bid P2P

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Persentase pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus					90%					100%		100%		100%		100%		100%	100%	Bid P2P
				Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					58%					100%		100%		100%		100%		100%	100%	Bid P2P
				Persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC					52%					100%		100%		100%		100%		100%	100%	Bid P2P
				Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV					80%					100%		100%		100%		100%		100%	100%	Bid P2P
				Persentase Perbaikan Gizi Masyarakat										82%		82%		84%		84%		84%	84%	Bid Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025				2026	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Persentase cakupan deteksi dini penyakit sesuai target										74%		76%		78%		80%		80%	Bid P2P
				Persentase Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Olahraga										47%		48%		49%		50%		50%	Bid Kesmas
				Persentase Kepesertaan JKN-KIS										62%		64%		66%		68%		68%	Bid SDK
				Persentase Penguatan pelayanan kesehatan tradisional										100%		100%		100%		100%		100%	Bid Yankes
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan tatalaksana penyakit menular sesuai standar									100%		100%		100%		100%		100%	Bid P2P

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
						Persentase cakupan tatalaksana penyakit tidak menular yang ditemukan sesuai standar								100%		100%		100%		100%		100%		Bid P2P
						Persentase pengelolaan penyakit malaria								94%		96%		98%		100%		100%		Bid P2P
						Persentase Desa STBM								34%		36%		38%		40%		40%		Bid Kesmas
						Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar								100%		100%		100%		100%		100%		Bid Yankes

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ				
										2021		2022		2023		2024		2025				2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sesuai standar								100%		100%		100%		100%		100%		Bid SDK	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin (SPM) sesuai standar								100%		100%		100%		100%		100%		Bid SDK	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								36442	Rp 876.840.528	36077	Rp 964.524.581	35714	Rp 1.060.977.039	34042	Rp 1.167.074.743	34042		Bid Kesmas
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai								34785	Rp 1.375.748.000	34417	Rp 1.513.322.800	34090	Rp 1.664.655.080	32494	Rp 1.831.120.588	32494		Bid Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								Standar																
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						33129		32792		32468		30947		30947		Bid Kesmas
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						171047	Rp 1.360.481.896	169177	Rp 1.496.530.086	167421	Rp 1.646.183.095	167014	Rp 1.810.801.404	167014		Bid Kesmas
							Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						171529		171529		171529		171529		171529		Bid Kesmas
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						385524		385524		385524		385524		385524		Bid Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ					
										2021		2022		2023		2024		2025				2026				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						1557142		1557142		1557142		1557142		1557142		1557142	Bid P2P	
							Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						767032	Rp 36.760.000	767032	Rp 40.436.000	767032	Rp 44.479.600	767032	Rp 48.927.560	767032	Rp 48.927.560	767032	Rp 48.927.560	Bid P2P
							Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						38018	Rp 320.960.000	38018	Rp 353.056.000	38018	Rp 388.361.600	38018	Rp 388.361.600	38018	Rp 427.197.760	38018	Rp 427.197.760	Bid P2P
							Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat						2480	Rp 123.840.000	2480	Rp 136.224.000	2480	Rp 149.846.400	2480	Rp 149.846.400	2480	Rp 164.831.040	2480	Rp 164.831.040	Bid P2P

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								Sesuai Standar																
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					29736	Rp 257.371.797	29736	Rp 283.108.977	29736	Rp 311.419.874	29736	Rp 342.561.862	29736		Bid P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					33469	Rp 48.000.000	33469	Rp 52.800.000	33469	Rp 58.080.000	33469	Rp 63.888.000	33469		Bid P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai target					14	Rp 9.102.319.768	14	Rp 10.012.551.745	14	Rp 11.013.806.920	14	Rp 12.115.187.612	14		Bid P2P

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar						1		1		1		1		1		Bid P2P
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1	Rp 4.204.347.600	1	Rp 4.624.782.360	1	Rp 5.087.260.596	1	Rp 5.595.986.656	1		Bid Kesmas
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						1	Rp 25.080.000	1	Rp 27.588.000	1	Rp 30.346.800	1	Rp 33.381.480,00	1		Bid Kesmas
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1	Rp 9.007.028.624	1	Rp 9.907.731.486	1	Rp 10.898.504.635	1	Rp 11.988.355.099	1		Bid Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						1	Rp 769.863.468	1	Rp 846.849.815	1	Rp 931.534.796	1	Rp 1.024.688.276	1		Bid Yankes
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						1		1		1		1		1		Bid P2P
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1	Rp 178.231.226.368	1	Rp 196.054.349.004	1	Rp 215.659.783.905	1	Rp 237.225.762.295	1		Bid SDK
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Sehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						1100	Rp. 167,647,000	1200	Rp. 184,411,700	1300	Rp. 202,852,870	1400	Rp. 223,138,157	1400		Bid Yankes

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Persentase pengelolaan Sistem informasi kesehatan terintegrasi										100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi								100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat
							Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							1	Rp 54.999.769	1	Rp 60.499.746	1	Rp 66.549.720	1	Rp 73.204.693	1	Sekretariat
				Persentase Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan										100%		100%		100%		100%		100%		Bid Yankes
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D	Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar									100%		100%		100%		100%		100%		Bid Yankes

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna								8%		10%		12%		14%		14%	Bid Yankes
						Indeks Keluarga Sehat (IKS) Terintegrasi			0.08					0.10		0.11		0.12		0.13		0.13	Bid Yankes
						Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi			92%					100%		100%		100%		100%		100%	Bid Yankes
						Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar								100%		100%		100%		100%		100%	Bid Yankes

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						60	Rp 6.802.835.061	62	Rp 7.483.118.567	64	Rp 8.231.430.424	66	Rp 9.054.573.466	66		Bid Yankes
							Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						1	Rp 9.484.476.755	1	Rp 10.432.924.430	1	Rp 11.476.216.873	1	Rp 12.623.838.560	1		Bid Yankes
	Terlaksananya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase pengelolaan pemenuhan dan pembinaan Sumber daya manusia sesuai standar												91%		92%		93%		95%		95%		Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar										91%		92%		93%		95%		95%	Bid SDK
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dipenuhi									91%		92%		93%		95%		95%	Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ				
										2021		2022		2023		2024		2025				2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)						2602	Rp 19.380.126.348	2602	Rp 21.318.138.983	2602	Rp 23.449.952.881	2602	Rp 25.794.948.169	2602		2602	Bid SDK
							Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						50		50		50		50		50		50	Bid SDK
	Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Persentase pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar												100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL DIBERI IZIN SESUAI STANDAR	Persentase Apotek, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional diberi izin sesuai standar										77%		80%		83%		85%		85%		Bid SDK
				Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Sesuai Standar										82%		85%		88%		90%		90%		Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025				2026	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								77%		80%		83%		85%		85%	Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ		
										2021		2022		2023		2024		2025				2026	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						22		24		26		28		28	Bid SDK
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang diterbitkan								82%		85%		88%		90%		90%	Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh						22	Rp 447.561.400	24	Rp 492.317.540	26	Rp 541.549.294	28	Rp 595.704.223	28	Bid SDK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Industri Rumah Tangga																	
	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase pengelolaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar												66%		68%		70%		75%		75%		Bid Kesmas
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat										66%		68%		70%		75%		75%		Bid Kesmas
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,								66%		68%		70%		75%		75%		Bid Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan UKBM																			
							Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						1	Rp 57.520.949.133	1	Rp 63.273.044.046	1	Rp 69.600.348.451	1	Rp 76.560.383.296	1		1	Bid Kesmas
	Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pengelolaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten												92%		94%		96%		98%			98%		Sekretariat
	Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan												A		A		A		A			A		Bid Yankes, Skretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Usulan Kebutuhan Anggaran Dinas sesuai target/rencana										100%		100%		100%		100%		100%		100%	Sekretariat	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dinas Kesehatan										100%		100%		100%		100%		100%		100%	Sekretariat	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100%		100%		100%		100%		100%		100%	Sekretariat	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4	Rp 109.999.962	4	Rp 120.999.958	4	Rp 133.099.953	4	Rp 146.409.949	4	Rp 146.409.949	4	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						1837	Rp 133.826.189.257	1837	Rp 147.208.808.183	1837	Rp 161.929.689.001	1837	Rp 178.122.657.901	1837		Sekretariat
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12	Rp 6.642.580.780	12	Rp 7.306.838.858	12	Rp 8.037.522.744	12	Rp 8.841.275.018	12		Sekretariat
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah								100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						12		12		12		12		12		Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ				
										2021		2022		2023		2024		2025				2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						12		12		12		12		12		12	Sekretariat
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12		12		12		12		12		12	Sekretariat
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah								100%		100%		100%		100%		100%		100%	Sekretariat
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1	Rp 27.402.144	1	Rp 30.142.358	1	Rp 33.156.594	1	Rp 36.472.254	1	Rp 36.472.254	1	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						6	Rp 435.074.398	6	Rp 478.581.838	6	Rp 526.440.022	6	Rp 579.084.024	6	6	Sekretariat
							Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						2	Rp 54.945.990	2	Rp 60.440.589	2	Rp 66.484.648	2	Rp 73.133.113	2	2	Sekretariat
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						2	Rp 164.911.505	2	Rp 181.402.656	2	Rp 199.542.921	2	Rp 219.497.213	2	2	Sekretariat
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						136	Rp 251.691.000	136	Rp 276.860.100	136	Rp 304.546.110	136	Rp 335.000.721	136	136	Sekretariat
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						160	Rp 533.376.800	160	Rp 586.714.480	160	Rp 645.385.928	160	Rp 709.924.521	160	160	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ				
										2021		2022		2023		2024		2025				2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan								100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	Rp 55.000.000	12	Rp 60.500.000	12	Rp 66.550.000	12	Rp 73.205.000	12	Rp 73.205.000	12	Sekretariat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						12	Rp 441.375.000	12	Rp 485.512.500	12	Rp 534.063.750	12	Rp 587.470.125	12	Rp 587.470.125	12	Sekretariat
							Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						8	Rp 219.982.400	8	Rp 241.980.640	8	Rp 266.178.704	8	Rp 292.796.574	8	Rp 292.796.574	8	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1	Rp 139.685.326	1	Rp 153.653.859	1	Rp 169.019.244	1	Rp 185.921.169	1	1	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						14	Rp 346.499.395	14	Rp 381.149.335	14	Rp 419.264.268	14	Rp 461.190.695	14	14	Sekretariat
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						0	Rp 50.000.000	1	Rp 55.000.000	1	Rp 60.500.000	2	Rp 66.550.000	2	2	Sekretariat
					Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Rumah Sakit BLUD							3		3		3		3		3	3	RSUD
							Jumlah Puskesmas BLUD							0		50		50		50		50	50	Bid Yankes

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja PJ			
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						3		53		53		53			53	Bid Yankes

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Kesehatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kesehatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kesehatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-5, yaitu: “Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi”

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke-5 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah “ Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat ” Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan dapat diuraikan sebagaimana tabel 7.1 T-C. 28 berikut ini :

Tabel 7.1 TC-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Sebelum Perubahan									
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	69.1	70.1	70.6	71.2	71.9	72.1	72.1	72.1
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat									
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	174	160	150	140	130	120	110	110
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	9.22	8.22	7.22	6.75	6.22	6.22	6.22	6.22
3	Persentase Balita Stunting	12.3	12	11.8	11.4	11	10.8	10.4	10.4
Sasaran : Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
1	Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	B	B	B	B	B	A	A
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan sesuai standar	0%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	85%
2	Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alkes terkalibrasi	0%	62%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3	Persentase peningkatan	0%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

	kuantitas dan kualitas pelayanan esehatan Rumah Sakit								
4	Persentase Puskesmas dan Jaringannya sesuai Standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penguatan pelayanan kesehatan tradisional	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penguatan pelayanan kesehatan primer	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penguatan pelayanan kesehatan rujukan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Peningkatan Kesehatan Lingkungan	0%	35%	45%	50%	55%	60%	65%	70%
8	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan (12 indikator)	0%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM 1)	0%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM 2)	0%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM3)	0%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM 4)	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC (SPM 5)	0%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pelayanan kesehatan orang	0%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) (SPM 6)								
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (SPM 7)	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
16	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (SPM 8)	0%	55%	64%	73%	82%	91%	100%	100%
17	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (SPM 9)	0%	26%	41%	56%	71%	86%	100%	100%
18	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (SPM 10)	0%	79%	83%	87%	91%	95%	100%	100%
19	prosentase cakupan pelayanan lansia (SPM 11)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	prosentase cakupan pelayanan pada usia pendidikan dasar (SPM 12)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Prersentase Perbaikan Gizi Masyarakat	0%	0%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
22	Persentase Kepesertaan JKN-KIS	0%	62%	65%	68%	71%	74%	77%	77%
23	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Sesuai Standar	0%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
24	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan sesuai standar	0%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	85%

Setelah Perubahan									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	69.1	69,65	70.10	70.60	71.20	71.90	72.40	72.40
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	174	160	150	140	130	120	110	110
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	9.22	8.72	8.22	7.72	7.22	6.75	6.22	6.22
4	Persentase Balita Stunting	12.3	12	11.80	11.40	11	10.80	10.40	10.40
5	Angka Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan sesuai standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alkes terkalibrasi dan Terpelihara	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Sarana Prasarana Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk Kab. Jember	0%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	75%
11	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM 1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase ibu bersalin	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	mendapatkan pelayanan persalinan (SPM 2)								
13	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM3)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM 4)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	prosentase cakupan pelayanan pada usia pendidikan dasar (SPM 5)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (SPM 6)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	prosentase cakupan pelayanan lansia (SPM 7)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (SPM 8)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (SPM 9)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (SPM 10)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC (SPM 11)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) (SPM 12)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

23	Perseentase Perbaikan Gizi Masyarakat	0%	80%	80%	82%	82%	84%	84%	84%
24	Cakupan Diteksi Dini Penyakit sesuai Target	0%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
25	Persentase Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keluarga	0%	40%	45%	47%	48%	49%	50%	50%
26	Persentase Kepesertaan JKN-KIS	0%	59%	60%	62%	64%	66%	68%	68%
27	Persentase Penguatan pelayanan kesehatan tradisional	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase Cakupan Tatalaksana Penyakit Menular Sesuai Standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase Cakupan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase Pengelolaan Penyakit Malaria Sesuai Standar	0%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
31	Persentase Desa STBM	0%	30%	32%	34%	36%	38%	40%	40%
32	Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sesuai standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin (SPM) sesuai standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Persentase Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna	0%	6%	6%	8%	10%	12%	14%	14%
38	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Terintegrasi	0%	0,082%	0,9%	0,10%	0,11%	0,12%	0,13%	0,13%
39	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	0%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Persentase pengelolaan pemenuhan dan pembinaan Sumber daya manusia sesuai standar	0%	0%	90%	91%	92%	93%	95%	95%
42	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	0%	0%	90%	91%	92%	93%	95%	95%

43	Persentase Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dipenuhi	0%	0%	90%	91%	92%	93%	95%	95%
44	Persentase pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	Persentase Apotek, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional diberi izin sesuai standar	0%	0%	75%	77%	80%	83%	85%	85%
46	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Sesuai Standar	0%	0%	80%	82%	85%	88%	90%	90%
47	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0%	0%	75%	77%	80%	83%	85%	85%
48	Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang diterbitkan	0%	0%	80%	82%	85%	88%	90%	90%

49	Persentase pengelolaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar	0%	0%	64%	66%	68%	70%	75%	75%
50	Persentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	0%	0%	64%	66%	68%	70%	75%	75%
51	Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat , Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peningkatan UKBM	0%	0%	64%	66%	68%	70%	75%	75%
52	Persentase Pengelolaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	0%	0%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
53	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	B	A	A	A	A	A	A
54	Persentase Usulan Kebutuhan Anggaran Dinas sesuai target/ rencana	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dinas Kesehatan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

57	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
61	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	Jumlah Rumah Sakit BLUD	0	0	3	3	3	3	3	3
63	Jumlah Puskesmas BLUD	0	0	0	50	50	50	50	50

Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang - kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Kesehatan mengampu Sasaran Misi ke-5 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi”**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Kesehatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *good governance*/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Wajib Bidang Kesehatan menjabarkan 05 (Lima) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang kesehatan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.

2. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Kualitas Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat semakin meningkat
 - b. Terjadi penurunan Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - c. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dapat ditingkatkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara paripurna

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

Jember, 02 Desember 2022
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember

dr. Lilik Lailiyah, M.Kes
Pembina IV/a
NIP 19651028 199602 2 001